

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**



**OLEH :
MAHARDHI ARIF
156020102111004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG
2019**



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

"PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 22 Juli 2019

Mahasiswa,



Nama : MAHARDHI ARIF
NIM : 156020102111004
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI
PPS FEB UB

TESIS

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh :

MAHARDHI ARIF
156020102111004

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : **22 Juli 2019**
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D
Ketua



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 19761003 200112 1 003

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : MAHARDHI ARIF

Program Studi : ILMU EKONOMI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D

Pembimbing 2 : Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : David Kaluge, SE., MS., M.Ec-Dev., Ph.D

Dosen Penguji 2 : Prof. Dr. Ghozali Maskie, SE., MS

Tanggal Yudisium : 22 Juli 2019

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D..

NIP. 19761003 200112 1 003

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI	
Nama	Mahardhi Arif
Tinggi / Berat	173 cm / 70 kg
Tempat, tanggal lahir	Yogyakarta, 28 Agustus 1987
Agama	Islam
Alamat	Babadan RT 23 No.87 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Handphone	0856 289 89 79
E-mail	mahardhi.arif@gmail.com
PENDIDIKAN	
2015 - 2018	S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang (Proses Pengerjaan Tesis)
2006 - 2012	S1 Fakultas Ekonomika & Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (IPK: 3,29)
2003 - 2006	SMA Negeri 8 Yogyakarta
2000 - 2003	SLTP Negeri 5 Yogyakarta
1994 - 2000	SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta
1992 - 1994	TK ABA Sapen Yogyakarta
TRAINING DAN KURSUS	
2016	Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan, OJK, Jakarta
2015	Pelatihan Pengawasan BPR Syariah, OJK, Malang
2014	Pelatihan Pengawasan BPR Konvensional, OJK, Batam
2012	Pendidikan Calon Pengawas Bank (PCPB) Bank Indonesia, LPPI Jakarta
2009 - 2012	Sekolah Berkuda, Pikatan Stable Riding School Yogyakarta
2012	Pelatihan Public Speaking, Abhiseka Training Center Yogyakarta
2010 - 2011	English Extention Course, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2010 - 2012	Ketua Ikatan Pemuda Islam Babadan (IPIB), Babadan Banguntapan, Bantul
2010 - 2012	Koordinator Bidang Olahraga dan Seni, FORMISBA (Forum Remaja Islam Banguntapan)
2010 - 2011	Kepala Bidang Operasional, PALMAE (Pecinta Alam Mahasiswa Ekonomi), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
2009 - 2010	Kepala Divisi Rimba-Gunung PALMAE (Pecinta Alam Mahasiswa Ekonomi), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
2008 - 2009	Staf Departemen Eksternal SEF (Sharia Economic Forum) Universitas Gadjah Mada
2006 - 2008	Koordinator FOSIL KALAM (Forum Silaturahmi, Keluarga Muslim Alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta)

PENGALAMAN KERJA

2013 - 2017	Pengawas Bank Junior, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penempatan Kantor OJK Malang
2012 - 2013	Pengawas Bank setingkat Asisten Manajer, Bank Indonesia, Penempatan KPW BI Malang

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini dapat selesai dengan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Munawar Ismail, S.E., D.E.A., Ph.D., dan Bapak Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan tesis ini.
2. Bapak David Kaluge, SE., MS., M.Ec-Dev., Ph.D., dan Bapak Prof. Dr. Ghozali Maskie, SE., MS., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. Bapak dan Ibuku tercinta atas doa, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasihat, bekal ilmu hidup, dan segalanya yang telah diberikan.
5. Istriku tercinta Fitria Rizki Pradiptasari, anakku Khalif Athazaki Muttaqin dan Fayza Fissilmi Kaffah atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
6. Semua keluarga, kakak, dan adik tersayang.
7. Teman-teman S2 IE Reguler II Universitas Brawijaya angkatan 2015/2016.
8. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar pada penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Malang, Juli 2019

Mahardhi Arif

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Mahardhi Arif

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada 33 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2011 - 2016. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dilakukan penghitungan tingkat inklusi keuangan tiap provinsi dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berdasarkan metode Sarma (2015). Dalam metode tersebut, IIK meliputi tiga jenis dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan (aksesabilitas), ketersediaan jasa perbankan (availabilitas), dan penggunaan jasa perbankan. Selanjutnya, hasil perhitungan IIK tersebut digunakan untuk meneliti pengaruh dari inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan perhitungan regresi data panel. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa secara umum Indonesia telah memiliki tingkat Inklusi Keuangan yang tinggi. Selain itu, tingkat Inklusi Keuangan pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.



THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION ON POVERTY IN INDONESIA

Mahardhi Arif

Master Program in Economics, Faculty of Economics and Business
Brawijaya University**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of financial inclusion on poverty levels in Indonesia in 33 provinces in Indonesia in the period 2011 - 2016. First of all the calculation of the level of financial inclusion of each province using the Index of Financial Inclusion (IFI) based on the Sarma (2015). In this method, IFI includes three types of dimensions, namely the dimensions of banking penetration (accessibility), the availability of banking services (availability), and the use of banking services. Furthermore, the results of the IFI calculations are used to examine the effect of financial inclusion on poverty levels in Indonesia using panel data regression calculations. From the results of this study, it can be seen that in general Indonesia has a high level of Financial Inclusion. In addition, the level of Financial Inclusion in 33 provinces in Indonesia has a significant influence on reducing poverty in Indonesia.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	IV
RIWAYAT HIDUP.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VII
ABSTRAK.....	8
ABSTRACT.....	9
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	5
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	9
1.3 TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN.....	10
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 TINJAUAN TEORI.....	11
2.1.1 <i>Inklusi Keuangan</i>	11
2.1.2 <i>Kemiskinan</i>	16
2.1.2.1. Definisi Kemiskinan.....	16
2.1.2.2. Determinan Kemiskinan.....	19
2.1.2.3. Pengukuran Kemiskinan.....	22
2.1.3 <i>Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan</i>	24
2.1.3.1. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.1.3.2. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Secara langsung.....	26
2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	29
2.2.1 <i>Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan</i>	29
2.2.2 <i>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan</i>	30
2.2.3 <i>Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan</i>	33
2.2.4 <i>Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan</i>	34
2.2.5 <i>Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan</i>	34
2.2.6 <i>Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Negara terhadap Kemiskinan</i>	35
BAB III.....	38
KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN.....	38
3.1 KERANGKA KONSEPTUAL.....	38
3.1.1 <i>Inklusi Keuangan</i>	38
3.1.2 <i>Kerangka Konseptual</i>	40
3.1.3 <i>Inklusi Keuangan dan Faktor-faktor Lain di Balik Kemiskinan</i>	44



3.2	HIPOTESIS PENELITIAN.....	46
3.3	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL.....	46
3.3.1	<i>Variabel Dependent</i>	46
3.3.2	<i>Variabel Independen</i>	47
BAB IV.....		49
METODE PENELITIAN.....		49
4.1	PENDEKATAN PENELITIAN.....	49
4.2	JENIS DAN SUMBER DATA.....	49
4.3	METODE ANALISIS.....	50
4.3.1	<i>Indeks Inklusi Keuangan</i>	50
4.3.2	<i>Analisis Regresi Data Panel</i>	53
4.3.3	<i>Pengujian Pemilihan Permodelan</i>	56
4.3.4	<i>Uji Hipotesis</i>	59
4.3.5	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	59
BAB V.....		63
HASIL ESTIMASI INDEKS INKLUSI KEUANGAN.....		63
5.1	INDEKS INKLUSI KEUANGAN (IIK) DI 33 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2011-2016.....	63
5.2	PEMBAHASAN.....	65
BAB VI.....		71
HASIL ESTIMASI PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN.....		71
6.1	HASIL ESTIMASI.....	71
6.1.1	<i>Pengujian Pemilihan Permodelan</i>	71
6.1.2	<i>Hasil Uji Asumsi Klasik</i>	73
6.1.3	<i>Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Ketimpangan</i> 75	75
6.1.3.1.	<i>Uji Koefisien Determinasi</i>	76
6.1.3.2.	<i>Uji F</i>	76
6.1.3.3.	<i>Uji t</i>	76
6.2	PEMBAHASAN.....	78
6.2.1	<i>Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di Indonesia</i>	78
6.2.2	<i>Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia</i> 80	80
6.3	KETERBATASAN PENELITIAN.....	81
BAB VII.....		82
KESIMPULAN DAN SARAN.....		82
7.1	KESIMPULAN.....	82
7.2	SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Karakteristik Sistem Keuangan Paramater Pengukuran	11
Tabel 4.1 Keterangan Variabel	54
Tabel 5.1 Komponen Perhitungan IIK.....	63
Tabel 5.2 Indeks Inklusi Keuangan IIK 33 Provinsi Indonesia 2011-2016.....	64
Tabel 6.1 Uji Chow	71
Tabel 6.2 Uji Hausman	72
Tabel 6.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	73
Tabel 6.4 Nilai Durbin Watson.....	74
Tabel 6.5 Hasil JB Test	74
Tabel 6.6 Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin	75

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	43
Gambar 3.2 Model Penelitian.....	46
Gambar 5.1 Rata-rata Indeks Inklusi Keuangan 33 Provinsi di Indonesia.....	66

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu mengenai kemiskinan merupakan salah satu pokok permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam topik pembangunan ekonomi, khususnya oleh negara sedang berkembang (*developing countries* atau *less developed countries*) di dunia. Hal ini terjadi dikarenakan sampai dengan saat ini, masalah kemiskinan masih sulit diselesaikan atau setidaknya membutuhkan jangka waktu yang panjang (Todaro dan Smith, 2012).

Negara-negara berkembang berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu dari beberapa indikator keberhasilan pada pembangunan. Namun, pada kenyataannya banyak negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi pula.

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau sebesar 10,70% (BPS, 2017).

Masalah kemiskinan pendapatan merupakan hal yang menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan tingkat kemiskinan tersebut. Salah satu upaya yang dipercaya dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ini salah satunya dengan cara pembangunan keuangan (*financial development*). Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya keterkaitan antara pembangunan keuangan dan penurunan

kemiskinan, antara lain penelitian oleh Beck, dkk (2005), Shahbaz dan Islam (2011) dan Ang (2010).

Menurut Odhiambo (2009) pembangunan keuangan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui beberapa cara. Pertama, pembangunan keuangan dapat meningkatkan akses kelompok miskin kepada keuangan formal dengan mengatasi kelemahan pasar keuangan seperti asimetri informasi, biaya transaksi yang tinggi, dan biaya lainnya.

Kedua, pembangunan keuangan memungkinkan orang miskin untuk menarik tabungan yang terkumpul atau meminjam uang untuk memulai usaha mikro, yang akhirnya mengarah pada akses yang lebih luas ke layanan keuangan, menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi dan dengan demikian mengurangi kemiskinan.

Terakhir, pembangunan sektor keuangan dapat menetes ke kaum miskin melalui pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Hal ini karena adanya hubungan positif antara pembanugnan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori *trickle-down*, Aghion dan Bolton (1997) telah menunjukkan bahwa semakin banyak modal terakumulasi dalam perekonomian, semakin banyak dana yang tersedia bagi orang miskin untuk tujuan investasi. Ini bisa berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Teori *trickle-down* telah banyak didukung oleh banyak penelitian seperti Fan dkk. (2000), Ravallion dan Datt (2002), Norton (2002) serta Dollar dan Kray (2002).

Salah satu indikator pembangunan sektor keuangan dapat dilihat melalui tingkat inklusi keuangan. Keuangan yang inklusif sendiri menurut Bank Indonesia (2014) adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala macam hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan.

The World Bank (2014) secara ringkas mendefinisikan inklusi keuangan sebagai jumlah proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan.

Dengan demikian, inklusi keuangan sangat erat kaitannya dengan layanan jasa keuangan, khususnya industri perbankan.

Menurut Bank Indonesia, keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah istilah yang mulai banyak dikenal setelah terjadinya krisis 2008. Karena pada saat itu krisis berdampak pada kelompok lapisan masyarakat bawah, yaitu mereka yang memiliki pendapatan rendah dan tidak teratur, bertempat tinggal di daerah terpencil, orang cacat (disabilitas), pekerja yang tidak tercatat secara legal, dan sebagainya yang umumnya tidak dianggap layak oleh bank (*unbankable*) yang tercatat tinggi pada negara-negara berkembang. Strategi keuangan inklusif pun semakin massif dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan dorongan berbagai organisasi internasional seperti *World Bank*, IMF, ADB, G20, dan sebagainya.

Pada bulan November 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pejabat lainnya (setkab.go.id, 2016).

Salah satu tujuan SNKI adalah menjadikan keuangan inklusif bagian dari strategi dalam pembangunan ekonomi, upaya penurunan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, sistem keuangan yang semakin inklusif akan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi setiap penduduk terhadap jasa keuangan, terutama bagi kelompok miskin dan memiliki akses yang terbatas pada jasa keuangan. Dengan mengakses layanan keuangan, masyarakat miskin akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Berbagai program dalam rangka peningkatan inklusi keuangan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga jasa keuangan. Antara lain melalui program-program untuk memperluas akses keuangan, seperti program “Laku Pandai” (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif) dan program “Jaring” (pemberdayaan sektor kemaritiman dengan cara meningkatkan program pembiayaan), Tabungan “SimPel” (Simpanan Pelajar), asuransi mikro, kampanye “Yuk Nabung Saham” dan “Nabung Emas”, serta program-program lainnya.

Berbagai program tersebut dilaksanakan sebagai upaya strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan penduduk di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK pada tahun 2016, indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%, sehingga pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 dapat tercapai 75%.

Perkembangan perbankan Indonesia sendiri tergolong cukup baik dengan pertumbuhan asset yang terus meningkat. Pada tahun 2016, total asset perbankan Indonesia sebesar mencapai Rp6.843 triliun, meningkat sebesar 37,01% dari tahun 2015. Dalam sepuluh tahun terakhir (2007 s.d. 2016), rata-rata pertumbuhan asset bank umum di Indonesia mencapai sebesar 26,53% tiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa ekspansi perbankan di Indonesia terus dipacu dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Namun demikian, meskipun upaya pembangunan keuangan dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia, di lain sisi terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa pembangunan keuangan (*financial development*) tidak berhasil mengurangi kemiskinan antara lain Seven dan

Coskun (2016), Claessens dan Perotti (2007), Law dan Tan (2009), serta Jauch dan Watzka (2015).

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses sektor keuangan akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, antara lain penelitian oleh Beck dkk (2004), Shahbaz dan Islam (2011), dan Ang (2010).

Di sisi lain, beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa pembangunan sektor keuangan (*financial development*) tidak berhasil mengurangi kemiskinan. Antara lain Seven dan Coskun (2016), Claessens dan Perotti (2007), Law dan Tan (2009). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemajuan sektor keuangan suatu negara tidak selamanya menjadi solusi dalam menurunkan kemiskinan.

Sementara itu, di Indonesia pemerintah menganggap tingkat inklusi keuangan masih rendah sehingga pemerintah menggalakkan perkembangan sektor keuangan dengan berbagai cara dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah strategi meningkatkan inklusi keuangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Bahkan terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kampanye inklusi keuangan hanyalah merupakan strategi pemasaran dari sektor perbankan untuk lebih banyak mendapatkan keuntungan. Perluasan akses perbankan bagi masyarakat miskin dan pelosok dianggap sebagai strategi memperbesar *funding* sebagai penyerap dana masyarakat, sementara selanjutnya dana akan disalurkan ke masyarakat kota yang dianggap lebih layak menerima kredit (*bankable*)

dibandingkan masyarakat pelosok dan miskin. Hal ini kemudian justru akan dapat semakin memperbesar ketimpangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inklusi keuangan pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun secara spesifik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan pada kemiskinan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
2. Memberikan gambaran terkait pengaruh inklusi keuangan pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Inklusi Keuangan

Sektor Keuangan merupakan satu hal penting dan menjadi perhatian dalam konsep pembangunan ekonomi. Berbagai penelitian berupaya untuk mengetahui peran sistem keuangan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut Cihak dkk. (2012), yang juga digunakan oleh *World Bank*, sistem keuangan memiliki karakteristik utama dalam pengukurannya, yaitu meliputi (a) kedalaman (*depth*); (b) akses; (c) efisiensi, dan (d) stabilitas. Keempat dimensi pengukuran tersebut digunakan dalam lembaga keuangan (*Financial Institutions*) dan pasar keuangan (*Financial Markets*).

Berikut ini matriks karakteristik sistem keuangan beserta dengan contoh perhitungannya yang digunakan *World Bank* untuk *The Global Financial Development Database*:

Tabel 2.1 Matriks Karakteristik Sistem Keuangan Paramater Pengukuran

	Lembaga Keuangan	Pasar Keuangan
Kedalaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kredit sektor swasta terhadap PDB ▪ Aset Lembaga keuangan terhadap PDB ▪ Jumlah uang beredar terhadap PDB ▪ Tabungan terhadap PDB ▪ Nilai tambah bruto sektor keuangan terhadap PDB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapitalisasi pasar saham ditambah surat hutang swasta dalam negeri terhadap PDB ▪ Surat hutang swasta terhadap PDB ▪ Surat hutang publik terhadap PDB ▪ Surat hutang internasional terhadap PDB ▪ Kapitalisasi pasar saham terhadap PDB ▪ Saham diperdagangkan terhadap PDB

ACCESS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah akun per seribu orang dewasa (bank umum) ▪ Jumlah Cabang per 100.000 orang dewasa (bank umum) ▪ % penduduk yang memiliki rekening bank ▪ % perusahaan penerima kredit (semua perusahaan) ▪ % perusahaan penerima kredit (perusahaan kecil) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kapitalisasi pasar di luar 10 besar perusahaan terbesar ▪ Persentase nilai yang diperdagangkan di luar 10 perusahaan teratas yang diperdagangkan ▪ Imbal hasil obligasi pemerintah (3 bulan dan 10 tahun) ▪ Rasio efek domestik terhadap total utang ▪ Rasio surat utang swasta terhadap total surat utang (domestik) ▪ Rasio penerbitan surat utang swasta baru terhadap PDB
EFFICIENCY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Net Interest Margin</i> ▪ Penyebaran pinjaman dan simpanan ▪ Pendapatan non-bunga terhadap total pendapatan ▪ Biaya overhead (% dari total aset) ▪ Profitabilitas (pengembalian aset, laba atas ekuitas) ▪ Indikator Boone (atau Herfindahl atau H-statistik) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio <i>turnover</i> (pergantian / kapitalisasi) untuk pasar saham ▪ Sinkronisasi harga ▪ Dampak harga perdagangan swasta ▪ Likuiditas / biaya transaksi ▪ <i>Spread</i> Permintaan terhadap obligasi pemerintah ▪ <i>turnover</i> obligasi (swasta, publik) pada efisiensi Penyelesaian pertukaran bursa efek
STABILITY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z-score (atau jarak ke default) ▪ rasio kecukupan modal ▪ rasio kualitas aset ▪ rasio likuiditas ▪ lainnya (posisi devisa neto ke modal dll) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volatilitas (standar deviasi / rata-rata) dari indeks harga saham dan indeks obligasi negara ▪ <i>Skewness</i> indeks (harga saham, obligasi negara) ▪ Kerentanan terhadap manipulasi pendapatan ▪ Rasio harga / pendapatan ▪ Durasi ▪ Rasio obligasi jangka pendek terhadap total obligasi (domestik, internasional)

Sumber: Cihak dkk. (2012)

Dalam beberapa literatur terdahulu, penelitian terkait pembangunan keuangan (*financial development*) lebih banyak berfokus pada dimensi kedalaman sistem keuangan (*depth*) seperti perhitungan persentase penyaluran kredit terhadap PDB, persentase jumlah aset lembaga keuangan dibanding PDB, persentase jumlah tabungan terhadap PDB, dan sebagainya. Sementara itu untuk dimensi

akses, belum terlalu banyak diteliti. Padahal, dimensi akses merupakan hal yang penting karena suatu sistem finansial yang telah terbangun (*well-developed*), belum tentu memiliki sistem keuangan yang inklusif atau dapat diakses dengan baik (Sarma, 2008).

Namun demikian, belakangan ini mulai dilakukan penelitian dengan mengedepankan dimensi akses melalui konsep inklusi keuangan. Menurut Bank Indonesia, keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah istilah yang mulai banyak dikenal setelah terjadinya krisis 2008. Karena pada saat itu krisis memberikan dampak yang cukup berpengaruh kepada kelompok lapisan masyarakat bawah. Karena pada saat itu krisis memberikan dampak yang cukup berpengaruh kepada kelompok lapisan masyarakat bawah, yaitu mereka yang memiliki pendapatan rendah dan tidak teratur, bertempat tinggal di daerah terpencil, orang cacat (disabilitas), pekerja yang tidak tercatat secara legal, dan sebagainya, yang umumnya tidak dianggap layak oleh bank (*unbankable*) yang tercatat tinggi pada negara-negara berkembang.

Pada acara G20 Pittsburgh *Summit* 2009, para anggota G20 sepakat bahwa peningkatan akses keuangan bagi kelompok bawah ini perlu untuk ditingkatkan. Hal ini kemudian dipertegas lagi pada acara Toronto *Summit* tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Prinsip Inklusi Keuangan Inovatif sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif, meliputi kepemimpinan (*leadership*), inovasi (*innovation*), pemberdayaan (*empowerment*), keberagaman (*diversity*), perlindungan (*protection*), pengetahuan (*knowledge*), kerjasama (*cooperation*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kerangka kerja (*framework*) (Bank Indonesia, 2014).

Sejak saat itu banyak organisasi internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti APEC, *World Bank*, IMF, *Asian*

Development Bank (ADB), *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), dan sebagainya, termasuk juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Istilah Inklusi keuangan sendiri belum memiliki definisi yang baku. Terdapat beberapa definisi yang dikeluarkan oleh institusi atau peneliti yang berbeda namun memiliki substansi pengertian yang kurang lebih sama. Dalam penelitiannya, yang merupakan salah satu acuan utama para peneliti inklusi keuangan, Sarma (2012) mendefinisikan konsep inklusi keuangan ini sebagai suatu proses untuk menciptakan kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan formal, ketersediaan jasa dan lembaga keuangan, serta pemanfaatan lembaga keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Demircuc-Kunt dan Klapper (2012), inklusi keuangan merupakan penyediaan akses jasa keuangan secara luas dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam penggunaannya. *The World Bank* (2014) secara ringkas mendefinisikan inklusi keuangan sebagai jumlah proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan.

Sementara menurut Bank Indonesia (2014), keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala macam hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan.

Untuk mengukur tingkat keuangan yang inklusif pada sebuah negara, dapat digunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu tingkat ketersediaan/akses pada lembaga keuangan, untuk mengukur seberapa jauh jasa keuangan formal dapat terjangkau baik secara fisik maupun secara harga. Kedua tingkat penggunaan, untuk mengetahui bagaimana kemampuan penggunaan produk dan jasa keuangan secara aktual (antara lain keteraturan penggunaan, seberapa sering penggunaan dan lama waktu penggunaan). Ketiga yaitu tingkat kualitas, untuk mengetahui

apakah kelengkapan produk dan jasa keuangan telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, dan tingkat kesejahteraan untuk mengukur seberapa besar layanan keuangan dapat memberikan dampak terhadap kehidupan pengguna jasa keuangan.

Beberapa penelitian memisahkan antara konsep akses jasa keuangan dengan konsep penggunaan jasa keuangan. Tersedianya akses jasa keuangan dapat diketahui melalui jumlah jaringan kantor perbankan dan *outlet* ATM yang tersebar pada suatu wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah rekening tabungan dan kredit yang disalurkan (World Bank, 2009). Sarma merangkum berbagai konsep tersebut ke dalam satu bentuk konsep baru yaitu *Index of Financial Inclusion* (Indeks Inklusi Keuangan). Indeks ini digunakan untuk mengukur seberapa tingkat inklusi keuangan di dalam suatu negara. Perhitungan konsep Indeks Inklusi Keuangan (IIK) yang dikembangkan Sarma (2012) menggunakan tiga dimensi dengan menggunakan jasa perbankan sebagai proxy dari keseluruhan jasa keuangan, yaitu tingkat penetrasi perbankan (aksesabilitas), tingkat ketersediaan jasa perbankan (availibilitas), dan tingkat penggunaan jasa perbankan.

a. Penetrasi Perbankan (Aksesibilitas)

Sistem keuangan yang inklusif berarti harus memiliki sebanyak mungkin jumlah pengguna. Dengan demikian, sistem keuangan dapat menjangkau penggunanya secara luas. Sebagai ukuran sejauh mana jasa perbankan menjangkau masyarakat (penetrasi perbankan), dapat dihitung dengan jumlah rekening perbankan dibandingkan jumlah populasi. Penetrasi perbankan ini merupakan indikator utama dalam pengukuran inklusi keuangan.

b. Ketersediaan jasa keuangan (Availibilitas)

Dalam sebuah sistem keuangan yang inklusif, ketersediaan jasa keuangan harus dapat dijangkau bagi seluruh penggunanya. Untuk mengetahuinya, dapat diukur dengan melihat jumlah outlet perbankan yang tersedia misalnya jaringan kantor dan ATM. Hal ini penting karena melalui outlet tersebutlah masyarakat bisa menggunakan jasa perbankan seperti menabung, mengambil uang, mengajukan kredit, melakukan pembayaran, dan penggunaan jasa keuangan lainnya. Selain ketersediaan outlet, dengan perkembangan teknologi saat ini beberapa bank juga telah menggunakan *mobile banking* dan *internet banking* dalam memberikan akses penggunaan jasa keuangan.

c. Penggunaan jasa perbankan

Meskipun telah tersedia akses terhadap jasa keuangan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan. Terdapat berbagai alasan yang mendasarinya diantaranya, masalah keyakinan agama, jauhnya kantor bank atau karena pernah memiliki pengalaman yang tidak baik dengan penyedia jasa keuangan. Oleh karena itu, jumlah kepemilikan rekening masih belum sepenuhnya dapat menunjukkan tingkat inklusi, sehingga harus diketahui pula seberapa banyak penggunaannya. Tingkat penggunaan tersebut dapat diketahui antara lain dengan mengetahui bentuk penggunaan kredit, tabungan, pembayaran, pengiriman uang, dan sebagainya.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1. Definisi Kemiskinan

Dalam *Handbook on Poverty and Inequality* (Haughton dan Khandker, 2009) yang diterbitkan oleh The World Bank, pengertian kemiskinan menurut World Bank adalah ketidakmampuan dalam mendapatkan kesejahteraan (*well-being*). Amartya

Sen, penerima nobel ekonomi atas karyanya dalam ekonomi kesejahteraan, lebih jauh berpendapat bahwa kemiskinan dapat muncul ketika seseorang tidak mempunyai kemampuan kunci utama, sehingga penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi, atau pendidikan yang kurang memadai, atau munculnya ketakutan dan rasa tidak aman, atau kesehatan tubuh yang buruk, atau kurangnya kepercayaan diri, atau memiliki rasa ketidakberdayaan, atau tidak terpenuhinya hak-hak seperti hak kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ini, konsep kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensi sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan solusi yang sederhana.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan pada sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan maupun selain makanan. Untuk mengukurnya yaitu dengan melihat dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, Penduduk Miskin yaitu adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya tiap kepala (perkapita) perbulan berada di bawah batas garis kemiskinan. Pengertian Garis kemiskinan (GK) menurut BPS adalah batasan dimana seseorang dapat dikatakan miskin, hal ini ditentukan dari standar suatu negara pada tingkat tertentu dari perkembangan ekonominya.

GK terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan yang kedua Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). GKM yaitu jumlah pengeluaran penduduk untuk kebutuhan minimum dalam bentuk makanan yang disetarakan dengan jumlah 2.100 kilokalori perkapita perhari.

Komoditi kebutuhan dasar makanan dalam perhitungannya diwakili oleh 52 jenis komoditi antara lain terdiri dari jenis padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan-ikanan, susu, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya). Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum dalam hal perumahan (tempat tinggal),

sandang/pakaian, Pendidikan, dan kesehatan. Komoditi kebutuhan dasar yang bersifat non makanan ini diwakili dengan 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk di pedesaan. Sehingga GK adalah jumlah GKM ditambah GKNM. Kemudian penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapitanya tiap bulan berada di bawah GK, dimasukkan dalam kategori penduduk miskin.

Menurut UNDP, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan dalam melakukan upaya untuk memperluas pilihan-pilihan hidup dari berbagai aspek. Termasuk sebagai salah satu indikator kemiskinan, terdapat penilaian mengenai kemampuan untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan kebijakan publik. Sedangkan menurut Chriswardani (2005), pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, jenis ini berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan dasar minimum yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan cara membandingkan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan orang tersebut untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk dapat menjamin keberlangsungan hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan social. Hal ini karena bisa jadi seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun hal tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya atau lingkungannya. Semakin besarnya jarak ketimpangan antara tingkat kehidupan kelompok atas dan kelompok bawah, maka dapat dikatakan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat

dikategorikan sebagai miskin, sehingga kemiskinan relatif ini erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

- c. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang timbul akibat permasalahan sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya atau kebiasaan, misalnya malas bekerja, tidak mau berusaha, boros, tidak kreatif, dan sebagainya.
- d. Kemiskinan struktural, yaitu kondisi miskin yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya. Hal ini dapat terjadi dalam suatu sistem sosial budaya atau sistem sosial politik yang tidak mendukung terciptanya pengurangan kemiskinan, bahkan menambah kemiskinan.

2.1.2.2. Determinan Kemiskinan

Determinan Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan beberapa level, yaitu kemiskinan dalam suatu negara, masyarakat, rumah tangga, maupun individu. Menurut Haughton dan Khandker (2009), kemiskinan dalam level negara sangat spesifik tergantung karakteristik negara masing-masing. Secara umum, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu negara misalnya seperti daerah yang terisolasi secara geografi, sumberdaya alam yang terbatas, curah hujan yang rendah, dan sebagainya. Selain kondisi geografis, karakteristik penting lainnya adalah tata kelola pemerintahan, kebijakan lingkungan, stabilitas ekonomi-politik, keamanan, penegakan hukum, dan sebagainya.

Dalam level masyarakat di suatu daerah regional, kemiskinan tergantung pada tingkat kemiskinan rumah tangga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Pada level ini, kondisi infrastruktur merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan. Indikator pembangunan infrastruktur antara lain meliputi pembangunan jalan raya, ketersediaan listrik, ketersediaan sekolah dan

rumah sakit. Indikator lainnya yaitu tingkat pembangunan sumberdaya manusia, akses lapangan pekerjaan, dan distribusi lahan, serta tak kalah pentingnya adalah jaringan modal sosial yang meliputi kepercayaan antar anggota masyarakat.

Selanjutnya, dalam karakteristik level rumah tangga dan individu, faktor yang mempengaruhi kemiskinan terbagi dalam tiga kelompok, yaitu demografi, ekonomi, dan karakteristik sosial. Ukuran dan struktur demografi (seperti usia dan jenis kelamin) dalam suatu rumah tangga merupakan hal penting karena dapat menunjukkan korelasi antara tingkat kemiskinan dan komposisi demografi rumah tangga. Sementara karakteristik ekonomi seperti tingkat pendapatan, konsumsi, jabatan pekerjaan, serta kepemilikan asset dan properti suatu rumah tangga, tentu merupakan indikator penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu rumah tangga atau individu. Sedangkan karakteristik sosial yaitu meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kondisi tempat tinggal.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani (2005), terdapat beberapa penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. *Policy induces processes*: yaitu suatu proses pemiskinan yang dilestarikan dan direproduksi melalui implementasi atas suatu kebijakan (*induced of policy*).

Misalnya kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan namun sebaliknya justru dapat memperparah kemiskinan.

b. *Socio-economic dualism*: negara yang pernah mengalami penjajahan, seperti misalnya Indonesia, mengalami kemiskinan bisa jadi karena pola produksi yang diwarisi dari masa penjajahan dulu, sehingga petani menjadi terpinggirkan karena lahan tanah dengan kualitas yang terbaik dikuasai oleh petani skala besar yang memiliki orientasi untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya.

- c. *Population growth*: Menurut teori Malthus bahwa terdapat ketimpangan antara penambahan penduduk dengan penambahan pangan. Jumlah penduduk bertambah seperti deret ukur sedangkan jumlah pangan bertambah seperti deret hitung. Hal ini menyebabkan jumlah produksi pangan tidak akan pernah dapat mencukupi untuk seluruh penduduk.
- d. *Reources management and the environment*: yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, misalnya proses manajemen pertanian yang tidak memperhitungkan produktivitas dan keberlanjutan tanaman pertanian.
- e. *Natural cycles and processes*: yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini menyebabkan produktivitas masyarakat yang tidak optimal.
- f. *The marginalization of woman*: yaitu diskriminasi terhadap kaum perempuan karena dianggap sebagai golongan yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*: yaitu faktor budaya dan etnik yang menciptakan dan melestarikan kemiskinan. Contohnya, gaya hidup konsumtif dan pemborosan yang dilakukan oleh petani dan nelayan pada saat panen raya, serta budaya konsumtif berlebihan pada saat upacara adat atau upacara keagamaan.
- h. *Explotative intermediation*: yaitu keberadaan pihak yang seolah-olah sebagai penolong namun sebenarnya justru menyengsarakan, misalnya keberadaan rentenir atau lintah darat di masyarakat.
- i. *Internal political fragmentation and civil conflict*: yaitu penerapan suatu kebijakan di suatu daerah yang memiliki fragmentasi politik kuat, sehingga menyebabkan suatu keadaan yang tidak kondusif dan berujung pada kemiskinan.

j. *International processes*: yaitu berlakunya sistem internasional yang tidak berpihak pada golongan miskin (misalnya kolonialisme dan kapitalisme).

Selain faktor-faktor di atas, terdapat penyebab kemiskinan lain di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan aset, yaitu:

a. *Natural assets*: misalnya yaitu tanah dan air. Sebagian besar masyarakat pedesaan hanya menguasai lahan terbatas yang kurang memadai untuk mendukung produktifitas kerjanya.

b. *Human assets*: yaitu menyangkut kualitas sumber daya manusia pedesaan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (misalnya dalam hal pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, maupun tingkat kesehatan).

c. *Physical assets*: yaitu minimnya akses terhadap infrastruktur dan akses fasilitas umum seperti jaringan listrik, jalan raya, dan sarana komunikasi di wilayah pedesaan.

d. *Financial assets*: yaitu berupa tabungan (*saving*) serta akses dalam memperoleh pendanaan atau modal usaha.

e. *Social assets*: yaitu berupa koneksi, jaringan, dan pengaruh politik. Misalnya kemampuan posisi tawar dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis.

2.1.2.3. Pengukuran Kemiskinan

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui tingkat kemiskinan. Antara lain dengan menggunakan *Headcount Index* (P_0), *Poverty Gap Index* (P_1), dan *Poverty Severity Index* (P_2). *Headcount index* merupakan metode yang sederhana untuk dilakukan dan mudah dimengerti, yakni dengan menghitung persentase jumlah

penduduk di bawah garis kemiskinan dari total populasi penduduk. *Headcount Index*

(P_0) dirumuskan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

$$P_0 = \frac{q}{n}$$

Poverty Gap Index (P_1) adalah indeks untuk mengukur tingkat kedalaman

kemiskinan di suatu wilayah terhadap garis kemiskinan. Menurut BPS, *Poverty Gap*

Index (Index Kedalaman Kemiskinan) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan

pengeluaran setiap kepala penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sehingga

dalam indeks ini apabila nilainya semakin tinggi, maka semakin jauh pula rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Rumus *Poverty Gap Index* sebagai

berikut:

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^1$$

Selanjutnya, *Poverty Severity Index* (P_2) atau Indeks Keparahan

Kemiskinan menggambarkan tingkat distribusi pengeluaran di antara penduduk

miskin. Sehingga, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. *Poverty Severity Index*

dirumuskan sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

2.1.3 Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan

Menurut Levine (2004), pembangunan sektor keuangan (termasuk di dalamnya inklusi keuangan) dapat mempengaruhi kondisi sistem keuangan di suatu negara melalui lima cara yaitu:

1. Menghasilkan informasi tentang tabungan/investasi untuk pengalokasian modal

Sektor keuangan yang terbangun dengan baik akan menghasilkan informasi tepat tentang perusahaan yang akan dibiayai dan kondisi pasar, sehingga memudahkan investor untuk menentukan penyaluran dananya dengan lebih tepat dan cepat.

2. Meningkatkan pemantauan investasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan

Sektor keuangan yang terbangun dengan baik akan mengatasi "*agency problem*" sehingga dana yang disalurkan pada debitur dapat tetap terpantau dengan sistem yang baik. Dengan demikian hal ini akan menciptakan keamanan investasi.

3. Memfasilitasi perdagangan, diversifikasi, dan manajemen risiko

Dengan terciptanya sistem keuangan yang baik, maka risiko yang mungkin timbul pada proses perdagangan dan diversifikasi investasi dapat dimitigasi dengan baik. Dengan demikian, akan meningkatkan likuiditas di masyarakat, mengurangi risiko, meningkatkan investasi jangka panjang, dan menghasilkan *return* yang lebih tinggi.

4. Memobilisasi dan mengumpulkan tabungan

Pengumpulan tabungan merupakan proses penghimpunan modal dari berbagai sumber yang memerlukan biaya yang besar. Dengan terciptanya sistem keuangan yang maju, hal ini akan mengurangi biaya dalam penghimpunan modal dengan lebih efektif, aman, dan cepat.

5. Memberikan kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa

Sistem keuangan dapat memfasilitasi transaksi ekonomi, baik dengan secara fisik menyediakan mekanisme untuk melakukan dan menerima pembayaran, maupun dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi. Dengan demikian, sektor keuangan akan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, meningkatkan spesialisasi dan inovasi teknologi, yang kemudian akan menurunkan biaya transaksi perdagangan dan biaya informasi melalui inovasi sektor keuangan. Dengan terciptanya kemudahan dalam transaksi perdagangan barang dan jasa, maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, sektor keuangan yang telah terbangun dengan baik akan dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan melalui dua cara, yaitu secara tidak langsung (yaitu melalui pertumbuhan ekonomi) dan secara langsung.

2.1.3.1. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Terciptanya sektor keuangan yang handal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terjadinya peningkatan jumlah simpanan, akumulasi modal, inovasi teknologi, dan peningkatan pendapatan (Zhuang dkk., 2009). Pertumbuhan ekonomi tersebut secara tidak langsung kemudian akan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

Terdapat beberapa saluran bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan (Zhuang dkk., 2009) yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan munculnya lapangan kerja baru dan kesempatan yang lebih banyak bagi kelompok miskin.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar buruh yang terampil (*skilled*) dengan yang tidak

terampil (*unskilled*). Hal ini menguntungkan bagi kelompok miskin yang umumnya *unskilled labor*.

3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan meningkatkan pendapatan pajak yang semakin tinggi pula. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengeluaran sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga akan bermanfaat bagi orang miskin. Selain itu, kelompok miskin juga akan dapat berinvestasi lebih banyak dalam modal manusia (*human capital*).

4. Dengan peningkatan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan lebih banyak dana yang didapatkan orang miskin untuk dialokasikan pada tujuan investasi, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

2.1.3.2. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Secara langsung

Selama ini, masyarakat miskin memiliki hambatan untuk mendapatkan akses terhadap jasa lembaga keuangan formal. Hal ini karena asimetri informasi menghasilkan hambatan kredit yang secara khusus menghalangi orang miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mendanai usaha mereka sendiri, atau jaminan untuk mendapatkan kredit bank (Zhuang dkk., 2009).

Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan meningkatkan inklusi keuangan. Meningkatnya inklusi keuangan akan mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi sehingga memudahkan akses jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Dengan mendapatkan permodalan, kelompok miskin dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya (Greenwood dan Jovanovic 1990). Selain itu, pembangunan sektor keuangan juga akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (*human capital*) melalui peningkatan pendidikan dan mengurangi

kerentanan kemiskinan dengan adanya dana darurat serta perataan konsumsi (*consumption smoothing*).

Inklusi keuangan menurut Sarma (2012) mencakup tiga dimensi pengukuran, yaitu penetrasi perbankan (aksesabilitas), ketersediaan jasa perbankan (availibilitas), dan penggunaan jasa perbankan. Dimensi aksesabilitas menunjukkan bagaimana penetrasi perbankan terhadap masyarakat yang tercermin dari seberapa banyak orang yang mengakses lembaga jasa keuangan formal. Jumlah penduduk miskin yang tinggi pada suatu negara berkembang dapat turut mengakses lembaga keuangan dengan pembangunan sistem keuangan yang lebih baik, sehingga hal ini akan berdampak pada penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesabilitas ini yaitu menghilangkan hambatan-hambatan untuk mengakses jasa keuangan antara lain dengan cara menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang jasa keuangan kepada kelompok miskin yang selama ini belum mengenal lembaga keuangan formal.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mempermudah persyaratan untuk mempunyai simpanan di bank maupun persyaratan untuk mendapatkan kredit, menurunkan biaya-biaya yang mungkin muncul, serta menyediakan program atau jenis produk yang menyesuaikan dengan kondisi kelompok miskin ini.

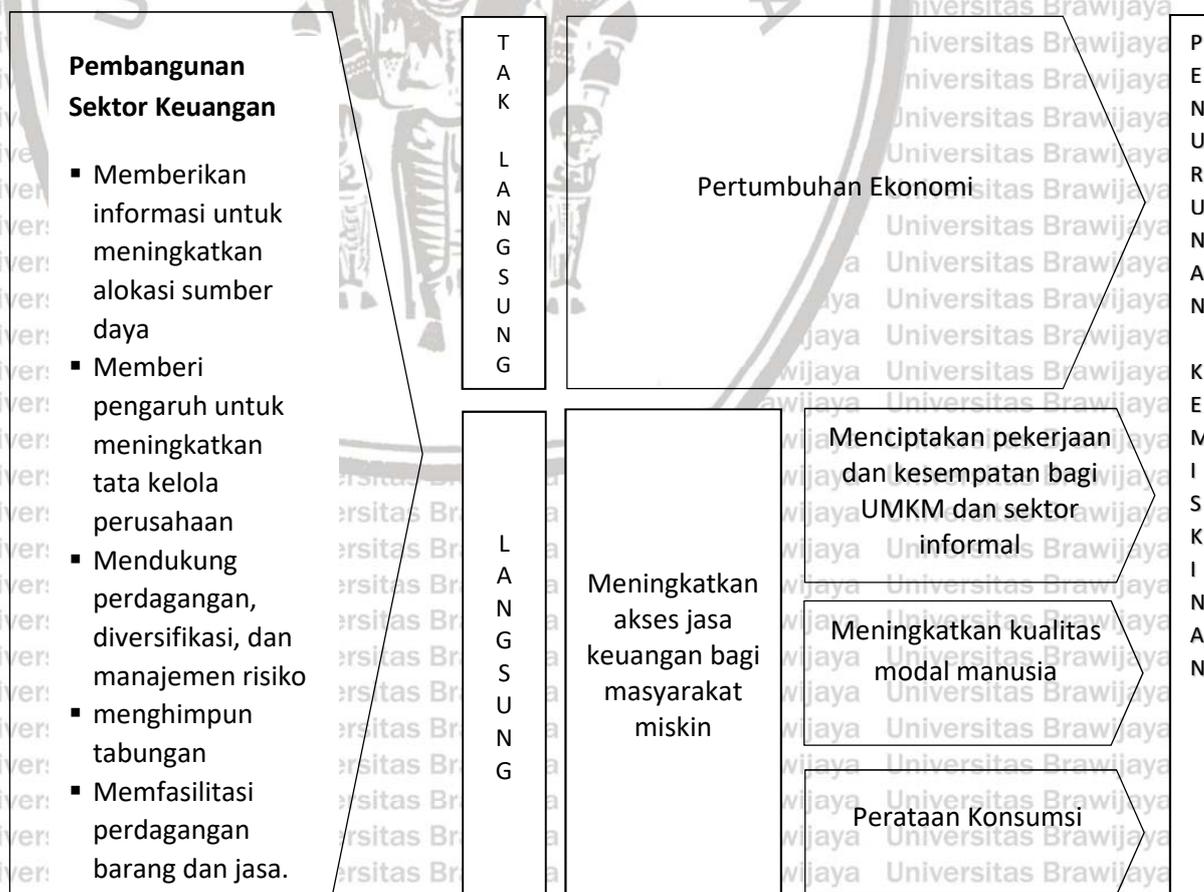
Selanjutnya, melalui perbaikan pada dimensi availibilitas, maka ketersediaan akses akan semakin banyak melalui berbagai saluran. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membuka outlet-outlet penyedia jasa keuangan atau perwakilan lembaga keuangan yang dapat menjangkau penduduk miskin seperti misalnya masyarakat di pedesaan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih luas.

Dengan adanya akses yang semakin banyak dan beragam ini, kelompok miskin pun dapat lebih mudah untuk menjangkau lembaga jasa keuangan .

Sementara melalui peningkatan pada dimensi penggunaan, artinya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat (termasuk kelompok miskin) semakin banyak, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan suatu konsep bagaimana pembangunan sektor keuangan dapat berpengaruh pada tingkat kemiskinan melalui cara tak langsung dan langsung sebagaimana diuraikan Zhuang dkk. (2009) dalam bagan di bawah ini:

Gambar 3.1 Pengaruh Pembangunan Keuangan Pada Kemiskinan



2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan

Beberapa penelitian melihat dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan. Beck dkk (2007) menganalisis dampak dari pembangunan sektor keuangan (*financial development*) terhadap pendapatan masyarakat miskin menggunakan data pada 72 negara pada tahun 1960-2005. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan sektor keuangan akan mendorong pendapatan penduduk miskin tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan GDP per kapita.

Burgess dan Pande (2005) menemukan bahwa perluasan cabang bank pedesaan di India telah membantu mengurangi kemiskinan. Secara khusus, penelitian tersebut menemukan bukti kuat bahwa pembukaan jaringan kantor bank di lokasi pedesaan yang memiliki reputasi kurang baik di India berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan pedesaan di wilayah tersebut. Demikian pula Brune dkk (2011), menemukan bahwa peningkatan akses keuangan melalui akun tabungan di pedesaan Malawi memperbaiki kesejahteraan rumah tangga miskin karena tersedianya akses keuangan untuk keperluan pertanian mereka.

Menurut Park dan Mercado (2015), peningkatan inklusi keuangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena semakin banyak orang yang mengakses jasa keuangan untuk membantu aktifitas konsumsinya dan untuk aktifitas produktif.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pada negara-negara berkembang di Asia, hubungan antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan merupakan hubungan yang lemah.

Di sisi lain, beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa pembangunan keuangan (*financial development*) tidak berhasil mengurangi kemiskinan dan

ketimpangan. Seven dan Coskun (2016) menemukan bahwa meskipun pembangunan keuangan (yang tercermin dari perbankan dan pasar modal) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, namun hal tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan pada penduduk miskin serta tidak memiliki peran signifikan pada penurunan kemiskinan.

Alasan lain untuk kemungkinan dampak negatif dari perkembangan sektor keuangan terhadap kemiskinan adalah bahwa pembangunan keuangan (yang erat kaitannya dengan liberalisasi keuangan) yang pesat tanpa disertai dengan institusi politik / ekonomi yang kuat, dan kurangnya peraturan kehati-hatian dan (atau) pengawasan dapat menyebabkan krisis keuangan / ekonomi yang berdampak pada tingkat pengangguran dan penurunan tingkat pendapatan riil (Seven dan Coskun, 2016).

Guillaumont Jeanneney dan Kpodar (2008) berpendapat bahwa dampak positif dari pengembangan keuangan terhadap pengurangan kemiskinan dapat berkurang atau bahkan mungkin hilang sama sekali karena adanya ketidakstabilan sektor keuangan akibat krisis.

2.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dilakukan dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). *Gross Domestic Product* (GDP) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Mankiw (2007) adalah total pendapatan dan pengeluaran secara nasional atas nilai *output* barang dan jasa. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik untuk mengetahui pertumbuhan atau kinerja perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan PDB mengukur aliran uang dalam

suatu perekonomian. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah PDB yang digunakan untuk menghitung dalam lingkup provinsi.

Perdebatan mengenai pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah berlangsung sejak lama. Menurut Dollar dan Kraay (2002), pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat bagi kelompok miskin apabila pertumbuhan tersebut turut disertai dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya seperti penegakan hukum, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan pasar keuangan yang maju.

Saad-Filho (2010) menjelaskan mengenai pendekatan pembangunan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, bahwa negara memberikan suatu penekanan besar untuk investasi berskala besar, termasuk jika perlu, kepemilikan publik atas sektor-sektor utama, untuk menyediakan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk industrialisasi yang dipimpin oleh sektor swasta. Pendekatan ini mungkin penting untuk memberikan pertumbuhan yang cepat, penciptaan lapangan kerja, stabilitas makroekonomi dan neraca pembayaran yang berkelanjutan, yang pada gilirannya, seharusnya dapat mengurangi kemiskinan melalui tetesan (*trickle down effect*), terutama melalui penciptaan lapangan kerja. Dalam hal tersebut, pengentasan kemiskinan adalah hasil tidak langsung dari pertumbuhan. Dengan cara yang sama, beberapa peningkatan ketimpangan dianggap tidak dapat dihindari pada tahap awal pembangunan, karena ketimpangan akan sangat membantu akumulasi modal, karena, seperti yang disarankan oleh teori konsumsi Keynesian, orang kaya memiliki kecenderungan marginal lebih tinggi dalam menabung (*Marginal Propensity to Save*) daripada orang miskin.

Di sisi lain, pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan terutama bermula dari model

yang diciptakan oleh Kuznets (1955). Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa bentuk keterkaitan antara tingkat pertumbuhan dengan ketimpangan seperti huruf U terbalik, yaitu pada tahap awal pembangunan ekonomi pada negara miskin akan menciptakan ketimpangan yang besar yang kemudian ketimpangan akan kembali mengecil seiring dengan pembangunan yang terus berlanjut dan membaik. Berbagai penelitian selanjutnya turut mendukung bahwa memang pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong ketimpangan distribusi pendapatan yang besar, meskipun kemudian tidak terdapat penurunan ketimpangan sebagaimana hipotesis Kuznets (antara lain Ravallion, 1995; Dollar dan Kraay, 2002; Son dan Kakwani, 2003). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat menjadikan setiap kelompok di masyarakat untuk memperoleh keuntungan, namun demikian kelompok yang menguasai faktor produksi dan permodalan yang lebih kuat biasanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan kelompok lainnya (yaitu para buruh), sehingga ketimpangan semakin membesar.

Namun demikian, di samping mayoritas penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki pandangan lain. Menurut Agussalim (2005), penelitian yang dilakukan Ravallion dan Datt (2000) justru menghasilkan kesimpulan sedikit berbeda. Dalam penelitian mereka, dalam periode tahun 1950-an hingga 1990-an, pendapatan rata-rata per kapita di India meningkat sedangkan tingkat ketimpangan cenderung menurun. Demikian juga penelitian Ranis dkk. (1977) yang juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara pendapatan dan ketimpangan di Cina, yaitu ketimpangan cenderung menurun ketika pendapatan meningkat.

2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Menurut Boediono (1999) inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara keseluruhan dan secara terus menerus. Terjadinya kenaikan harga hanya pada sebagian kecil barang saja tidak termasuk dalam pengertian inflasi. Yang bisa disebut inflasi yaitu ketika kenaikan harga tersebut terjadi secara meluas atau mengakibatkan pula kenaikan secara umum pada harga barang-barang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inflasi merupakan salah satu dari beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang penting bagi suatu negara.

Hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui dua macam cara. Cara pertama, yaitu inflasi telah mengakibatkan nilai riil yang terkandung dalam uang mengalami penurunan. Sehingga, ketika terjadi kenaikan harga, maka jumlah yang dapat dibeli uang menjadi lebih sedikit, atau daya beli menjadi berkurang. Cara kedua, yaitu inflasi mengakibatkan nilai bunga yang didapatkan dari penyimpanan uang di bank menjadi menurun, sehingga daya beli juga menjadi berkurang. Menurunnya daya beli tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi lebih miskin daripada kondisi sebelumnya.

Menurut Easterly dan Fischer (2001), terjadinya inflasi lebih berdampak buruk pada kelompok miskin dibandingkan kelompok kaya. Orang kaya lebih mampu dan siap menghadapi terjadinya inflasi dengan lebih baik, bahkan sebagian dari mereka akan menyukai terjadinya inflasi karena mereka akan mendapatkan potensi keuntungan dari peningkatan suku bunga pada instrumen finansial. Dengan demikian, terjadinya inflasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan bahkan memperparah kondisi mereka yang sudah berada dalam kelompok miskin, sehingga ketimpangan pun menjadi semakin lebar.

2.2.4 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Menurut Becker (1995), modal manusia (*human capital*), diantaranya pendidikan, memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Hal ini bermula pada abad ke 19 di Inggris, dimana pendidikan mulai menjadi perhatian utama bagi perekonomian karena perkembangan ilmu pengetahuan memberikan pengembangan produk dan metode produksi yang lebih efisien, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya.

Selanjutnya, negara-negara dunia ketiga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik terbukti tumbuh lebih cepat dari rata-rata negara dunia ketiga lainnya. Pendidikan menjadi sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pengembangan strategi produk, inovasi teknologi, dan penelitian-penelitian untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk suatu negara mempunyai dampak terhadap proses dan hasil pada upaya pembangunan di suatu negara.

Jumlah penduduk yang banyak merupakan keuntungan suatu negara karena dapat menjadi modal utama dalam pembangunan apabila diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik. Namun sebaliknya, banyaknya jumlah penduduk apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik, maka justru akan dapat menjadi beban pada suatu negara.

Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2012), terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk secara pesat akan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan yang parah di suatu negara. Menurut Malthus jumlah populasi di suatu negara cenderung akan meningkat sangat cepat seperti deret ukur. Sementara itu, peningkatan jumlah persediaan pangan hanya meningkat

seperti deret hitung karena penambahan hasil produksi pangan yang semakin berkurang dari jumlah faktor produksi yang terbatas jumlahnya, yaitu lahan tanah.

Karena penambahan jumlah produksi pangan tidak pernah dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan jumlah penduduk, maka nilai produksi pangan perkapita akan cenderung terus menurun menuju titik terendahnya, karena jumlah pangan yang ada tidak pernah mencukupi untuk seluruh populasi penduduk. Hal inilah yang menyebabkan kondisi kemiskinan menjadi semakin kronis.

2.2.6 Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Negara terhadap Kemiskinan

Beck (2007) dalam penelitiannya menggunakan keterbukaan perdagangan (*trade openness*) sebagai salah satu variabel kontrol untuk mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Perdagangan ekspor dan impor suatu negara dinilai memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu negara.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dampak dari perdagangan bebas terhadap tingkat kemiskinan. Berbagai penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, bahkan saling berlawanan. Yang pertama, penelitian John Cockburn di negara Nepal (2001), yang menghasilkan kesimpulan bahwa terjadinya liberalisasi perdagangan di negara Nepal memberikan dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, namun jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan justru meningkat. Hal ini dapat terjadi karena liberalisasi perdagangan justru telah memperburuk sektor pertanian di wilayah pedesaan dengan masuknya produk-produk pertanian dengan harga yang lebih murah, sementara di lain sisi penduduk perkotaan diuntungkan dengan munculnya berbagai lapangan kerja dan kesempatan baru pada sektor perdagangan.

Penduduk perkotaan mendapat peluang dan keuntungan di sektor perdagangan

antara lain dengan membeli barang impor dengan harga yang murah lalu kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan Bahattasali, dkk (2005) yang meneliti negara-negara di beberapa wilayah Afrika, Asia Tengah, dan bekas daerah Uni Soviet, menyimpulkan bahwa terjadinya liberalisasi perdagangan justru menambah jumlah penduduk miskin karena ketimpangan kepemilikan asset yang dimiliki, yaitu misalnya lahan pertanian. Petani besar yang memiliki lahan lebih luas akan pula lebih mendapat keuntungan karena dapat lebih leluasa mengubah komoditi pertaniannya yang bersaing dengan masuknya produk impor ke jenis komoditi lainnya yang berorientasi ekspor. Sementara itu, petani dengan lahan sempit tidak dapat leluasa mengubah komoditi pertaniannya karena terbatasnya modal maupun pengetahuan yang tidak memadai. Padahal hampir sebagian besar petani yang berada di negara-negara yang diteliti adalah petani yang memiliki lahan sempit.

Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Madeley (2004) di beberapa negara berkembang menghasilkan kesimpulan yang kurang lebih sama, yaitu terjadinya liberalisasi perdagangan telah memberikan dampak buruk di suatu negara karena meningkatkan jumlah penduduk miskin di negara tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketrampilan tenaga kerja yang pernah bekerja di sektor pertanian di pedesaan yang terdampak oleh liberalisasi perdagangan, untuk dapat berpindah ke sektor perdagangan atau jasa di wilayah perkotaan yang mendapatkan keuntungan dari terjadinya liberalisasi perdagangan.

Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang sebaliknya justru menemukan bahwa dengan adanya perdagangan bebas akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin suatu negara. Yang pertama yaitu penelitian oleh Bank

Dunia (2004) pada 24 negara berkembang menemukan liberalisasi perdagangan telah membawa negara-negara yang melakukannya kondisinya menjadi lebih baik yaitu berupa terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi (hingga mencapai lebih dari 5 persen), meningkatnya harapan hidup yang lebih panjang, serta kualitas pendidikan yang meningkat.

Kedua, penelitian Jha dan Gupta (2004) menemukan bahwa liberalisasi perdagangan di India telah menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini karena melalui liberalisasi maka tarif bea-masuk produk pertanian India yang diekspor ke negara-negara lain mengecil atau bahkan menjadi nol persen. Sehingga negara India yang merupakan exportir produk-produk sektor pertanian diuntungkan yang kemudian menurunkan jumlah penduduk miskin. Ketiga, penelitian oleh Cororaton dan Cockburn (2005) antara tahun 1994 sampai 2000 di Filipina menemukan bahwa liberalisasi perdagangan (pembebasan bea-masuk produk impor Filipina) telah menurunkan jumlah penduduk miskin. Ini karena dengan pembebasan bea-masuk tersebut maka harga produk-produk di Filipina menurun yang kemudian juga menurunkan tingkat inflasi. Penurunan tingkat inflasi ini selanjutnya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga penduduk miskin pun jumlahnya menurun.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Dalam peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Konsep inklusi keuangan dianggap sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan (setkab.go.id, 2016). Keuangan yang semakin inklusif dianggap dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang.

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dilakukan penghitungan tingkat inklusi keuangan di Indonesia dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan (IIK). Selanjutnya, hasil perhitungan IIK tersebut akan digunakan untuk meneliti pengaruh dari inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

3.1.1 Inklusi Keuangan

Saat ini belum terdapat data tingkat inklusi keuangan di Indonesia yang lengkap, sehingga penelitian ini akan terlebih dahulu menghitung tingkat inklusi keuangan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan berdasarkan konsep yang telah dilakukan oleh Sarma (2015). Indeks ini akan digunakan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan pada 33 propinsi di Indonesia selama 6 tahun dari tahun 2011 sampai 2016 dengan perhitungan meliputi tiga jenis dimensi yaitu dimensi penetrasi

perbankan (aksesabilitas), ketersediaan jasa perbankan (availibilitas), dan penggunaan jasa perbankan.

1. Penetrasi Perbankan (Aksesibilitas)

Sistem keuangan yang inklusif berarti harus memiliki sebanyak mungkin jumlah pengguna. Oleh karena itu, sebuah sistem keuangan haruslah dapat menjangkau penggunanya secara luas. Sebagai ukuran sejauh mana jasa perbankan menjangkau masyarakat (penetrasi perbankan). Dalam penelitian ini, indikator dimensi penetrasi perbankan adalah proporsi jumlah rekening tabungan di bank umum pada setiap provinsi di Indonesia dibanding jumlah populasi penduduk dewasa pada provinsi tersebut. Sehingga apabila apabila warga suatu propinsi seluruhnya memiliki memiliki rekening bank, maka propinsi tersebut akan mendapat nilai 1 atau 100% dalam pengukuran dimensi ini.

2. Ketersediaan jasa perbankan (Availibilitas)

Dimensi kedua yaitu ketersediaan jasa perbankan. Dimensi ini menggambarkan seberapa luas jangkauan perbankan kepada masyarakat. Indikator dimensi ini dapat berupa jaringan kantor dari perbankan seperti jumlah jaringan kantor atau outelt ATM dalam suatu wilayah. Indikator untuk dimensi ini adalah proporsi jumlah jaringan kantor bank dan outlet ATM di masing-masing provinsi dibanding jumlah populasi usia dewasa di provinsi tersebut.

3. Penggunaan jasa perbankan

Dimensi yang ketiga adalah penggunaan jasa perbankan. Dimensi ini menggambarkan seberapa jauh jasa perbankan memeberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut Sarma (2012), meskipun seseorang memiliki akses ke sektor jasa keuangan formal (memiliki rekening bank) namun tidak seluruhnya memanfaatkan jasa keuangan tersebut karena berbagai alasan. Misalnya kantor

bank yang terlalu jauh, atau karena tidak adanya keinginan untuk menggunakan jasa tersebut. Dengan demikian, memiliki rekening bank tidaklah cukup, namun juga harus menggunakan atau memanfaatkan jasa bank yang ditawarkan, misalnya tabungan, deposito, kredit, transfer, dan sebagainya. Namun demikian, karena sulitnya mendapatkan data penggunaan seluruh jasa layanan perbankan, maka dalam penelitian ini perhitungan dimensi kegunaan jasa perbankan menggunakan data jumlah nominal kredit dan tabungan yang disalurkan bank umum di masing-masing provinsi dibandingkan dengan jumlah PDRB di provinsi tersebut.

3.1.2 Kerangka Konseptual

Menurut Levine (2004), pembangunan sektor keuangan (termasuk di dalamnya inklusi keuangan) dapat mempengaruhi kondisi sistem keuangan di suatu negara melalui lima cara yaitu:

1. Menghasilkan informasi tentang tabungan/investasi untuk pengalokasian modal
2. Meningkatkan pemantauan investasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan
3. Memfasilitasi perdagangan, diversifikasi, dan manajemen risiko
4. Memobilisasi dan mengumpulkan tabungan
5. Memberikan kemudahan dalam pertukaran barang dan jasa

Sistem keuangan dapat memfasilitasi transaksi ekonomi, baik dengan secara fisik menyediakan mekanisme untuk melakukan dan menerima pembayaran, maupun dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi. Dengan demikian, sektor keuangan akan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, meningkatkan spesialisasi dan inovasi teknologi, yang kemudian akan menurunkan biaya transaksi perdagangan dan biaya informasi melalui inovasi sektor keuangan.

Selama ini, masyarakat miskin memiliki hambatan untuk mendapatkan akses terhadap jasa lembaga keuangan formal. Hal ini karena asimetri informasi menghasilkan hambatan kredit yang secara khusus menghalangi orang miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mendanai usaha mereka sendiri, atau jaminan untuk mendapatkan kredit bank (Zhuang dkk., 2009).

Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan meningkatkan inklusi keuangan. Meningkatnya inklusi keuangan akan mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi sehingga memudahkan akses jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Dengan mendapatkan permodalan, kelompok miskin dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya (Greenwood dan Jovanovic 1990). Selain itu, pembangunan sektor keuangan juga akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (*human capital*) melalui peningkatan pendidikan dan mengurangi kerentanan kemiskinan dengan adanya dana darurat serta perataan konsumsi (*consumption smoothing*).

Inklusi keuangan menurut Sarma (2012) mencakup tiga dimensi pengukuran, yaitu penetrasi perbankan (aksesabilitas), ketersediaan jasa perbankan (availibilitas), dan penggunaan jasa perbankan. Dimensi aksesabilitas menunjukkan bagaimana penetrasi perbankan terhadap masyarakat yang tercermin dari seberapa banyak orang yang mengakses lembaga jasa keuangan formal. Jumlah penduduk miskin yang tinggi pada suatu negara berkembang dapat turut mengakses lembaga keuangan dengan pembangunan sistem keuangan yang lebih baik, sehingga hal ini akan berdampak pada penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesabilitas ini yaitu menghilangkan hambatan-hambatan untuk mengakses jasa keuangan antara lain dengan cara menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang jasa keuangan

kepada kelompok miskin yang selama ini belum mengenal lembaga keuangan formal.

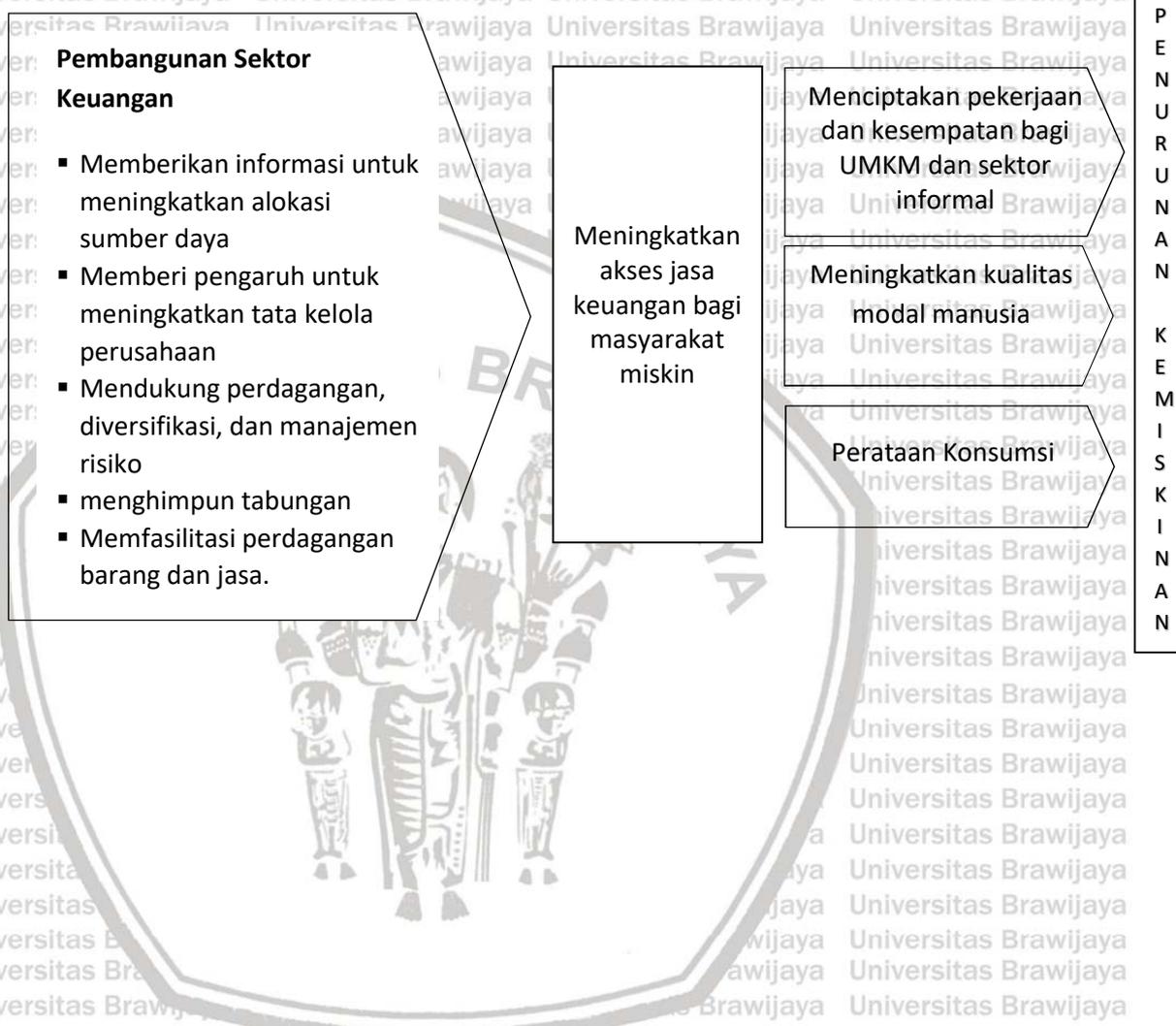
Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mempermudah persyaratan untuk mempunyai simpanan di bank maupun persyaratan untuk mendapatkan kredit, menurunkan biaya-biaya yang mungkin muncul, serta menyediakan program atau jenis produk yang menyesuaikan dengan kondisi kelompok miskin ini.

Selanjutnya, melalui perbaikan pada dimensi avaiibilitas, maka ketersediaan akses akan semakin banyak melalui berbagai saluran. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membuka outlet-outlet penyedia jasa keuangan atau perwakilan lembaga keuangan yang dapat menjangkau penduduk miskin seperti misalnya masyarakat di pedesaan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih luas. Dengan adanya akses yang semakin banyak dan beragam ini, kelompok miskin pun dapat lebih mudah untuk menjangkau lembaga jasa keuangan .

Sementara melalui peningkatan pada dimensi penggunaan, artinya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat (termasuk kelompok miskin) semakin banyak, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konsep penelitian ini yaitu bagaimana pembangunan sektor keuangan (dalam hal ini diwakili inklusi keuangan) dapat berpengaruh pada tingkat kemiskinan melalui cara tak langsung dan langsung sebagaimana diuraikan Zhuang dkk. (2009) dalam bagan di bawah ini:

Gambar 3.1 Kerangka Fikir Penelitian



3.1.3 Inklusi Keuangan dan Faktor-faktor Lain di Balik Kemiskinan

Beck, dkk (2007) menganalisis dampak dari pembangunan pada sektor keuangan (*financial development*) terhadap distribusi pendapatan, ketimpangan, dan kemiskinan pada 72 negara selama periode 1960-2005. Hasil penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pembangunan sektor keuangan akan mendorong pendapatan penduduk miskin tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan GDP per kapita.

Dalam penelitiannya tersebut, Beck, dkk (2007) menghitung pengaruh pembangunan keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan dengan variable kontrol yaitu tingkat pendidikan atau pencapaian sekolah sebagai indikator modal sumberdaya manusia, inflasi selama periode sampel untuk mengendalikan lingkungan makro ekonomi, dan rata-rata jumlah ekspor dan impor dibagi PDB untuk menangkap tingkat keterbukaan perdagangan. Selain itu, juga dimasukkan pertumbuhan populasi dan rasio penduduk sebagai regressor tambahan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep model Beck, dkk (2007) namun dengan sedikit perubahan, yaitu merubah variabel pembangunan keuangan (*financial development*) dengan inklusi keuangan (*financial inclusion*). Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusi terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, konsep pembangunan keuangan (*Financial Development*) lebih banyak berfokus pada dimensi kedalaman sistem keuangan (*depth*) yang sifatnya lebih makro dalam suatu negara, seperti perhitungan persentase penyaluran kredit dibanding PDB, persentase jumlah aset Lembaga keuangan dibanding PDB, persentase jumlah tabungan dibanding PDB, dan sebagainya. Padahal, suatu sistem finansial yang telah terbangun (*well-developed*),

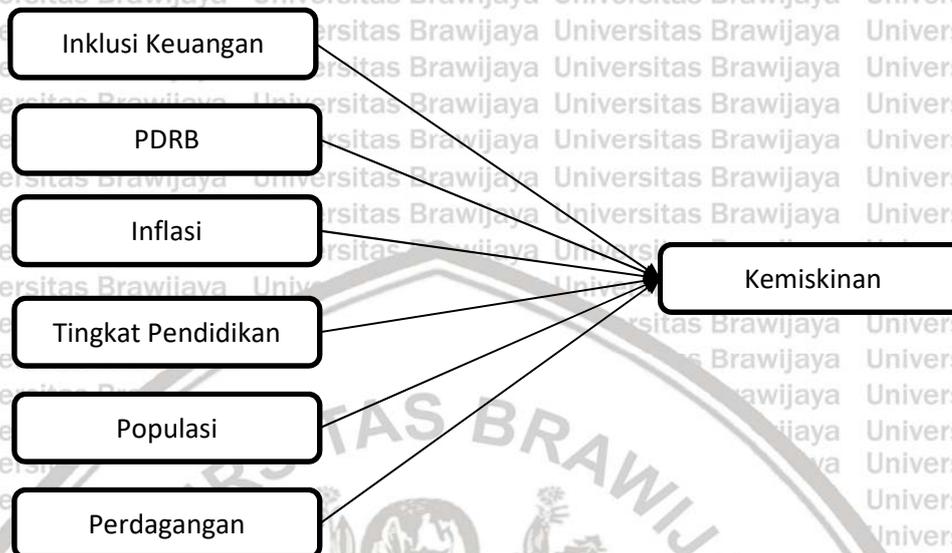
belum tentu memiliki sistem keuangan yang inklusif atau dapat diakses dengan baik (Sarma, 2008). Dengan demikian, penelitian pengaruh sektor keuangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan dengan menggunakan konsep inklusi keuangan dapat lebih sesuai karena inklusi keuangan lebih bersifat mikro yang memperhitungkan akses jasa keuangan secara individu.

Untuk menilai pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan, dalam penelitian ini juga digunakan faktor penentu lainnya sebagai variabel kontrol, yaitu:

1. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita riil untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan,
2. Inflasi selama periode sampel untuk mengendalikan lingkungan makro ekonomi,
3. Tingkat pendidikan atau pencapaian sekolah sebagai indikator modal sumberdaya manusia,
4. Rata-rata jumlah ekspor dan impor dibagi PDB untuk menangkap tingkat keterbukaan perdagangan,
5. Pertumbuhan populasi untuk mengetahui dampak pertumbuhan jumlah penduduk pada kemiskinan.

Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian penelitian dalam bagan di bawah ini.

Gambar 3.2 Model Penelitian



3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian yaitu tingkat inklusi keuangan berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan batasan dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian sehingga dapat diketahui cara untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian.

3.3.1 Variabel Dependent

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, yang diukur dengan menggunakan *Headcount Index*. Yaitu persentase jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan dari total populasi

pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016. Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3.2 Variabel Independen

1. Inklusi Keuangan

Pada penelitian ini, tingkat inklusi keuangan diukur dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan atau *Index of Financial Inclusion* pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sarma (2012) berdasarkan tiga dimensi, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Nilai Indeks Inklusi Keuangan berkisar antara 0 sampai 1.

2. PDRB

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah digunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai ini didapatkan dari perhitungan persentase PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu daerah atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Pada penelitian ini, digunakan inflasi pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sebagai indikator modal sumberdaya manusia dihitung dengan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) sampai dengan jenjang

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Pada penelitian ini, digunakan APM sampai dengan SMP pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Pertumbuhan Populasi

Pertambahan jumlah penduduk suatu negara mempunyai dampak terhadap proses dan hasil usaha pembangunan, termasuk tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini, digunakan perhitungan persentase pertumbuhan jumlah penduduk pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

6. Keterbukaan Perdagangan

Perdagangan ekspor dan impor di suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan warganya sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pada penelitian ini, tingkat keterbukaan perdagangan dihitung dengan persentase jumlah total ekspor dan impor dalam suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut, pada 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2016 dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan RI.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang disusun secara sistematis antara bagian-bagian, fenomena, dan hubungan yang terdapat dalam objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan menggunakan model matematis dengan teori, penelitian terdahulu serta adanya hipotesis yang berkaitan dengan suatu kejadian. Dimana data yang digunakan merupakan angka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistik.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, mula-mula akan dilakukan perhitungan indeks inklusi keuangan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan di Indonesia di 33 provinsi di Indonesia. Kemudian, indeks inklusi keuangan dimasukkan dalam perhitungan untuk dapat mengetahui faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pada 33 Provinsi di Indonesia periode 2011-2016.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari pihak lain, atau tidak secara langsung dari subjek penelitiannya. Jenis data sekunder pada umumnya merupakan data yang berbentuk dokumentasi atau berbentuk data laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari permintaan data kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), permintaan data kepada Kementerian Perdagangan, *website* Bank Indonesia, dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan data menurut 33 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2016 meliputi data perbankan, demografi, perdagangan, kemiskinan, dan ketimpangan.

4.3 Metode Analisis

4.3.1 Indeks Inklusi Keuangan

Indeks Inklusi Keuangan 33 provinsi di Indonesia diukur dengan metode yang dilakukan oleh Sarma (2015), dengan menggunakan tiga dimensi yang menjadi indikator IIK sebagai berikut:

i. Aksesibilitas

Untuk mengukur tingkat penetrasi perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah akun rekening tabungan bank per 1.000 penduduk dewasa (>15 tahun) dengan rumus:

$$A_1 = \frac{\text{Jumlah akun rekening tabungan Bank (tahun } t)}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa (tahun } t)} \times 1.000$$

ii. Availibilitas

Untuk mengukur ketersediaan jasa perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah outlet bank memperhitungkan rata-rata tertimbang (*wighted average*) 2/3 untuk jaringan kantor dan 1/3 untuk ATM per 100.000 penduduk dewasa dengan rumus:

$$A_2 = \frac{(\text{Jumlah kantor} \times 2/3) \text{ tahun } t + (\text{Jumlah ATM} \times 1/3) \text{ tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk (tahun } t)} \times 100.000$$

iii. Penggunaan Jasa Perbankan

Untuk mengukur penggunaan jasa perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah nominal kredit dan tabungan yang disalurkan bank umum konvensional di setiap provinsi dibagi dengan PDRB provinsi tersebut dengan rumus:

$$A_3 = \frac{\text{Jumlah kredit disalurkan (tahun } t) + \text{Dana pihak ketiga (tahun } t)}{\text{PDRB (tahun } t)}$$

Indeks inklusi keuangan dapat dihitung apabila telah diketahui nilai masing-masing dimensinya. Indeks dari setiap dimensi d_i , dihitung sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}; i = 1, 2, 3, \dots$$

Dimana:

w_i = bobot dimensi i , $0 \leq w_i \leq 1$

A_i = nilai aktual dari peubah i

m_i = nilai minimum (batas bawah) dari dimensi peubah i

M_i = nilai maksimum (batas atas) dari dimensi peubah i

Formula persamaan di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai d_i maka semakin tinggi pula pencapaian suatu daerah pada dimensi i tersebut.

Misalnya, semakin tinggi indeks dimensi 'ketersediaan' pada suatu provinsi, maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pula jumlah layanan perbankan yang dapat diakses masyarakat di provinsi tersebut.

Sebagaimana metode perhitungan IFI oleh Sarma (2015), penentuan nilai batas bawah (m_i) ditentukan nilai 0 untuk seluruh dimensi, sedangkan penentuan batas atas (M_i) menggunakan persentil ke-90 dari nilai tiap dimensi. Penggunaan persentil ke-90 dilakukan karena apabila penentuan batas menggunakan nilai tertinggi dalam tiap dimensi, hal ini akan berpotensi terjadinya bias pada skala nilai apabila data nilai tertinggi merupakan *outlier* dari data lainnya, sehingga menyebabkan data provinsi lainnya harus menghadapi *benchmark* nilai yang terlalu tinggi. Selanjutnya, jika suatu provinsi memiliki nilai dimensi yang lebih tinggi dari batas atas ini, maka ditetapkan sama dengan batas atas.

Adapun dalam penetapan bobot (w_i), ketiga dimensi yang dipertimbangkan di sini sama-sama penting dalam sistem keuangan inklusif, karena itu bisa saja

semua dimensi mendapatkan bobot yang sama yaitu 1. Namun demikian, menurut Sama (2015) dimensi availibilitas dan penggunaan hanya dapat diperhitungkan sebagian saja, karena kurangnya data tentang indikator penting yang mencirikan dimensi ini sepenuhnya.

Sebagai contoh, saat ini masyarakat telah banyak yang menggunakan layanan *phone banking* dan/atau *internet banking*, sehingga mengurangi pentingnya outlet fisik bank. Oleh karena itu, memperhitungkan data hanya pada outlet fisik (jaringan kantor dan ATM) tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang ketersediaan layanan perbankan. Demikian pula, data kredit dan deposito hanya dapat menggambarkan sebagian penggunaan sistem keuangan, sementara layanan perbankan lain, seperti pembayaran, transfer dan pengiriman uang sulit dihitung karena tidak tersedianya data yang memadai.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan bobot yang relatif lebih sedikit terhadap kedua dimensi terakhir ini. Dengan demikian, dalam indeks ini, bobot untuk dimensi penetrasi perbankan (aksesibilitas) adalah 1 sedangkan bobot untuk dimensi availibilitas dan dimensi penggunaan masing-masing adalah 0,5.

Selanjutnya, setelah diketahui nilai d_i dari masing-masing dimensi dari hasil perhitungan di atas, dilakukan perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dengan rumus berikut:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$X_2 = \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$IIK = \frac{1}{2} [X_1 + X_2]$$

Dimana X_1 adalah jarak normalitas Euclidean X dari titik terendah O , sedangkan X_2 merupakan jarak normalitas X dengan titik ideal w , sehingga nilai IIK dapat diketahui secara sederhana dengan menghitung rata-rata X_1 dan X_2 .

Sebagaimana dijelaskan Sarma (2015), nilai indeks dari setiap dimensi terletak antara 0 dan w_1 . Nilai w_1 yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak titik ideal pada dimensi ke i . Titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ menunjukkan pencapaian inklusi keuangan pada sebuah provinsi. Kemudian pada ruang dimensi, point $O = (0, 0, 0)$ merepresentasikan situasi yang terburuk, sedangkan titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ – di mana w_1, w_2, w_3 adalah bobot setiap dimensi yang mewakili situasi paling ideal untuk seluruh dimensi.

4.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab-akibat di antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Dalam penelitian ini, perhitungan menggunakan regresi data panel. Data panel adalah gabungan dua buah data yaitu data *cross section* dengan data bentuk *time series* (Kuncoro, 2011). Ada beberapa kelebihan dari metode data panel, yaitu pertama, data panel yang merupakan gabungan antara data bentuk *cross section* dengan data bentuk *time series* sehingga mampu menyediakan lebih banyak data sehingga akan berpengaruh pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) dengan nilai lebih besar. Kelebihan kedua, informasi dari data *cross section* dan *time series* yang digabungkan akan dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul ketika menghadapi masalah penghilangan variabel (Widarjono, 2013).

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan dan ketimpangan dengan model persamaan yang mengacu pada penelitian Beck (2007) dengan beberapa penyesuaian.

$$hcount_{it} = \alpha + \beta_2 IIK_{it} + \beta_3 pdrb_{it} + \beta_4 inflasi_{it} + \beta_5 school_{it} + \beta_6 g_pop_{it} + \beta_7 trade_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 4.1 Keterangan Variabel

Notasi	Variabel	Sumber	Tahun
HCOUNT	Tingkat Kemiskinan jumlah penduduk miskin dibandingkan penduduk (headcount poverty)	Badan Pusat Statistik (BPS)	2011-2016
IIK	Indek Inklusi Keuangan	Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS)	2011-2016
G_PDRBcap	Pertumbuhan dari PDRB riil per kapita (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)	2011-2016
INFLASI	Inflasi tahunan (%)	Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI)	2011-2016
SCHOOL	Angka Partisipasi Sekolah Murni, (SMP, tahunan%) Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan SMP yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.	Badan Pusat Statistik (BPS)	2011-2016
G_POP	Pertumbuhan populasi (tahunan %)	Badan Pusat Statistik (BPS)	2011-2016

TRADE	Jumlah ekspor dan import terhadap PDRB (%)	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan	2011-2016
-------	--	--	-----------

Metode yang digunakan yaitu regresi metode *Ordinary Lest Square* (OLS) menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) dalam pengujian.

OLS atau metode kuadrat terkecil merupakan metode penaksiran menggunakan prinsip meminimumkan jumlah penyimpangan kuadrat antara nilai prediksi dari variabel respon dengan nilai sebenarnya.

Metode OLS harus dapat memenuhi asumsi-asumsi BLUE (singkatan dari *Best Linear Unbiasd Estimator*) dalam estimasi interval dan pengujian parameter regresi dari populasi. Asumsi-asumsi yang harus memenuhi BLUE antara lain:

- Model regresi harus linear dalam parameter-parameternya.
- Tidak bersifat multikolinier yaitu variabel bebas tidak bersifat stokastik (bernilai tetap dalam sampel berulang) serta tidak terdapat suatu hubungan linear yang sama persis pada variable-variabel bebasnya.
- Bersifat homoskedastisitas, *Error term* memiliki varians yang konstan pada semua observasi, $E(\epsilon^2) = \sigma^2$.
- *Error term* atau galat pada regresi bernilai harapan nol, $E(\epsilon_i) = 0$.
- Tidak bersifat autokorelasi yaitu *Error term* pada obesrvasi tidak berhubungan dengan *error term* observasi lainnya.
- *Error term* dalam regresi berdistribusi normal.

Menurut Ajija dkk. (2010), metode data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lainnya, antara lain yaitu:

- a. Data panel mampu memperhitungkan sifat heterogenitas tiap individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik pada individu.
- b. Kemampuan dalam mengontrol heterogenitas individu ini akan membangun model perilaku dengan lebih kompleks.
- c. Data panel mendasarkan diri pada dua metode, yaitu observasi *cross section* yang dilakukan secara berulang waktu (*time series*), dengan demikian metode data panel ini tepat untuk digunakan sebagai konsep *study of dynamic adjustment*.
- d. Jumlah observasi yang banyak akan menghasilkan suatu data dengan sifat yang lebih informatif dan variatif, semakin berkurangnya kolinieritas antar variabel, serta peningkatan nilai derajat kebebasan atau *degree of freedom* sehingga akan didapatkan hasil estimasi yang lebih efisien.
- e. Data panel mampu meminimalkan terjadinya bias yang mungkin dapat ditimbulkan oleh agregasi data yang bersifat individu.

Dengan adanya keunggulan-keunggulan di atas, maka pengujian asumsi klasik pada model perhitungan data panel pada dasarnya tidak selalu harus dilakukan. Hal ini karena penelitian yang menggunakan metode data panel memungkinkan identifikasi suatu parameter tertentu tanpa harus perlu membuat asumsi yang ketat atau dapat dikatakan tidak mengharuskan untuk terpenuhinya semua asumsi klasik regresi linier.

4.3.3 Pengujian Pemilihan Permodelan

Data panel adalah gabungan dua buah data yaitu data *cross section* dengan data bentuk *time series*. Regresi dengan data panel menggunakan beberapa model pendekatan untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan

secara *Common Effect Model*, *Fixed Effects Model* serta *Random Effect Model* (Widarjono, 2013).

a) Common Effect Model (CEM)

Pendekatan model *Common Effect* merupakan pendekatan yang paling sederhana dibandingkan dengan pendekatan model data panel lainnya. *Common effect Model* tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku antar individu bersifat sama dalam berbagai kurun waktu, dan sebaliknya, *Common Effect Model* hanya akan mengkombinasikan data *time series* dengan *cross section* ke dalam bentuk pool.

b) Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan dengan *Fixed Effect* mengasumsikan adanya efek yang berbeda di antara objek yang satu dengan lainnya, meskipun telah menggunakan koefisien regresor yang sama. *Fixed Effect Model* merupakan teknik mengestimasi data dengan menggunakan suatu variabel *dummy* yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan intersep (Widarjono, 2013).

c) Random Effect Model (REM)

Random Effect Model merupakan pendekatan dengan menggunakan nilai residual yang diduga mempunyai hubungan antara waktu dengan objek (Widarjono, 2013). Model ini memiliki asumsi bahwa nilai intercept dari *individual effect* akan terdistribusi secara acak dengan nilai rata-rata konstan. Menurut pendekatan model ini, *error* dapat terjadi dalam komponen individu, komponen waktu, maupun gabungan anatara keduanya.

Untuk menentukan model yang terbaik di antara *common effect* (*pool*), *fixed effect*, serta *random effect* maka dapat digunakan dua macam teknik

estimasi model. Kedua teknik ini digunakan dalam perhitungan regresi data panel untuk dapat memperoleh model yang paling tepat dalam mengestimasi perhitungan regresi data panel. Dua macam uji yang digunakan, yaitu pertama adalah *Chow test* yang digunakan untuk memilih di antara model *common effect (pooled)* ataukah model *fixed effect*. Yang kedua, yaitu *Hausman test* yang digunakan untuk menentukan antara model *fixed effect (tetap)* atau *random effect (acak)* yang lebih baik dalam melakukan estimasi regresi data panel.

1. Uji Chow

Chow test merupakan sebuah pengujian dengan melihat hasil F statistik untuk memilih antara model yang lebih baik antara *common effect* atau *fixed effect* (Widarjono, 2013). Apabila nilai probabilitas signifikansi *Cross Statistic-F* lebih kecil daripada signifikansi $\alpha = 0,1$ maka H_0 diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi maka H_0 ditolak. Widarjono (2013) menyatakan bahwa H_0 mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dalam mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan saat hasil dari Uji Chow adalah menerima H_0 , yang memiliki arti bahwa *Fixed Effect Model* itu lebih baik jika dibandingkan dengan *Common Effect Model*. Uji Hausman ini dilakukan dengan membandingkan antara *Fixed Effect model* dengan *Random Effect Model*. Widarjono (2013) mengatakan bahwa uji hausman menggunakan statistik *chi square* dengan tingkat *degree of freedom* sebanyak jumlah variabel independen. Apabila nilai statistik *chi square* nya lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,1$ maka H_0 ditolak dan hal tersebut mengindikasikan bahwa *Random Effext Model* lebih baik apabila dibandingkan

dengan *Fixed Effect Model*. Dan sebaliknya, jika nilai statistik *chi square* lebih kecil dari signifikansi maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat untuk digunakan dalam perhitungan data panel (Widarjono, 2013).

4.3.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t, sedangkan uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik F. Koefisien determinasi (R^2) berasal dari hasil nilai *R-square* regresi, sedangkan uji statistik F berasal dari hasil nilai *F-statistic*. Widarjono (2013) mengatakan bahwa uji t-statistik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk uji-t adalah:

1. Jika signifikansi uji t $< 0,1$ maka hipotesis diterima, yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika signifikansi uji t $> 0,1$ maka hipotesis ditolak, yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi dalam penelitian supaya hasilnya *BLUE* atau *Best Linear Unbiased Estimator* (Ghozali, 2012). Oleh karena itu perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model yang digunakan, meliputi pengujian multikolenieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas.

- 1) Uji Multikolenieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat masalah multikolinearitas pada hubungan antar variabel independen (Sarjono dkk, 2011). Uji multikolinearitas perlu dilakukan jika jumlah variabel independen lebih dari satu. Menurut Wijaya (2009) terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, yaitu:

- Ketika hasil nilai dari suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, namun secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen.
- Dengan melakukan analisis terhadap korelasi di antara variabel independen. Apabila di antara variabel-variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (nilainya lebih besar dari 0,90), maka hal ini merupakan indikasi akan adanya multikolinearitas.
- Adanya multikolinearitas juga dapat diketahui melalui nilai VIF (kepanjangan dari *Variance-Inflating Factor*). Apabila $VIF < 10$, maka tingkat kolinearitas dapat ditorensi.
- Nilai *Eigenvalue* sejumlah satu atau lebih variabel independen yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji Multikolinearitas dilakukan dengan metode VIF (*Variance-Inflating Factor*).

2) Uji Heteroskedasitas

Menurut Wijaya (2009), heteroskedasitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak pernah sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain nilainya tetap, maka dapat disebut homoskedasitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedasitas

dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi adanya heteroskedasitas (Sarjono dkk, 2011).

Untuk melakukan pengujian terhadap heteroskedasitas dalam penelitian ini, dapat digunakan uji *Glejser* dengan asumsi:

- Nilai sig. < 0.05 : tidak ada gejala heteroskedasitas
- Nilai sig. > 0.05 : ada gejala heteroskedasitas

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat terjadi karena observasi yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dapat timbul karena residual saling berkaitan dari satu observasi ke observasi lainnya, yang mana sering ditemukan pada data yang bersifat *time series*. Menurut Kendall dan Buckland dalam Gujarati (2003), autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota dalam serangkaian observasi urut menurut waktu (*time series*). Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Durbin-Watson Stat.

4) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi faktor gangguan (*residual*) bersifat normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi secara normal atau tidak. Yang pertama dengan cara analisis grafik dan yang kedua yaitu dengan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat *normal probability plot* pada grafik histogram, yaitu dengan cara membandingkan antara distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Yang kedua yaitu dengan cara

uji statistik yang dilakukan dengan cara melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual.

Pengujian terhadap residual (*error term*) dapat dilakukan dengan tes *Jarque-Bera* atau *JB-Test*. Nilai *JB* hitung sebagai nilai X^2 hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai X^2 tabel. Uji normalitas ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai *JB* hitung dengan nilai X^2 tabel. Apabila diketahui nilai $JB_{hitung} > \text{nilai } X^2_{tabel}$ maka hasil uji menunjukkan tidak berdistribusi normal.

Sebaliknya, apabila $JB_{hitung} < \text{nilai } X^2_{tabel}$, maka hasil uji menunjukkan berdistribusi normal.



BAB V

HASIL ESTIMASI INDEKS INKLUSI KEUANGAN

5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data antara lain dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Dimensi IIK 33 Provinsi Tahun 2016

Dimensi	Minimum	Maksimum	Mean
Aksesibilitas	630,46 (Lampung)	3444,74 (DKI Jakarta)	1049,61
Availabilitas	14 (Sulawesi Barat)	122 (DKI Jakarta)	30,81
Penggunaan Jasa	0,27 (Riau)	2,98 (DKI Jakarta)	0,65
IIK	0,43 (Lampung)	0,99 (DKI Jakarta)	0,68

5.2 Indeks Inklusi Keuangan (IIK) di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2016

Pada penelitian ini, perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) di 33 Provinsi Indonesia periode 2011-2016 diadaptasi dari metode *Index Financial Inclusion* (IFI) yang dilakukan oleh Sarma (2015). Komponen perhitungan IIK yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Komponen Perhitungan IIK

Dimensi (d_i)	Bobot (w_i)	Indikator Dimensi	m_i	M_i
Aksesibilitas (d_1)	1,0	Jumlah akun rekening tabungan / 1000 populasi dewasa	0	1142,34
Availabilitas (d_2)	0,5	Jumlah jaringan kantor bank dan ATM/100.000 populasi dewasa	0	39,59
Penggunaan Jasa (d_3)	0,5	Kredit + tabungan /PDRB	0	0,77

Sebagaimana metode perhitungan IFI oleh Sarma (2015), penentuan nilai batas bawah (m_i) ditentukan nilai 0 untuk seluruh dimensi, sedangkan penentuan batas atas (M_i) menggunakan persentil ke-90 dari nilai tiap dimensi.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai d_i sehingga dapat diketahui nilai X_1 dan X_2 untuk mengetahui Indeks Inklusi Keuangan dengan rumus IFI sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}; i = 1, 2, 3, \dots$$

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$X_2 = \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$IIK = \frac{1}{2} [X_1 + X_2]$$

Dari perhitungan rumus IIK di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3 Indeks Inklusi Keuangan IIK 33 Provinsi Indonesia 2011-2016

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata	Rank
ACEH	0.7255	0.6789	0.7127	0.7395	0.7499	0.7330	0.7232	12
SUMATERA UTARA	0.7484	0.7374	0.7341	0.7763	0.7701	0.7575	0.7540	9
SUMATERA BARAT	0.7842	0.7048	0.7158	0.7216	0.7218	0.7192	0.7279	11
RIAU	0.6635	0.6467	0.6320	0.6463	0.6351	0.6220	0.6409	17
JAMBI	0.5666	0.5753	0.6006	0.6262	0.6210	0.6399	0.6049	24
SUMATERA SELATAN	0.6005	0.5951	0.6057	0.5915	0.5809	0.5723	0.5910	28
BENGKULU	0.6314	0.6468	0.6498	0.6745	0.6901	0.6886	0.6635	14
LAMPUNG	0.4016	0.4212	0.4414	0.4411	0.4507	0.4466	0.4338	33
KEP. BANGKA BELITUNG	0.6062	0.6127	0.5995	0.6054	0.5948	0.6138	0.6054	23
KEP. RIAU	0.8851	0.8848	0.8993	0.8875	0.8838	0.8829	0.8873	3

DKI JAKARTA	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	1
JAWA BARAT	0.6114	0.6107	0.6310	0.6420	0.6288	0.6304	0.6257	22
JAWA TENGAH	0.5899	0.5859	0.6218	0.6552	0.6533	0.6720	0.6297	20
DI YOGYAKARTA	0.9806	0.9793	0.9697	0.9574	0.9326	0.9351	0.9591	2
JAWA TIMUR	0.6039	0.6024	0.6289	0.6598	0.6583	0.6633	0.6361	18
BANTEN	0.6193	0.6310	0.6460	0.6587	0.6441	0.6583	0.6429	16
BALI	0.8886	0.8677	0.8443	0.8647	0.8568	0.8850	0.8679	4
NUSA TENGGARA BARAT	0.4718	0.4719	0.5166	0.5665	0.5854	0.5872	0.5332	31
NUSA TENGGARA TIMUR	0.5337	0.5400	0.5935	0.5968	0.6143	0.5984	0.5794	29
KALIMANTAN BARAT	0.6498	0.6524	0.6734	0.6944	0.7127	0.7052	0.6813	13
KALIMANTAN TENGAH	0.5771	0.5851	0.5784	0.5986	0.5986	0.6164	0.5923	27
KALIMANTAN SELATAN	0.7475	0.7403	0.7515	0.7793	0.7758	0.7654	0.7600	8
KALIMANTAN TIMUR	0.8405	0.8414	0.8520	0.8489	0.8455	0.8454	0.8456	5
SULAWESI UTARA	0.7961	0.7674	0.7673	0.7769	0.7594	0.7567	0.7706	7
SULAWESI TENGAH	0.5438	0.5110	0.5693	0.5806	0.5897	0.5692	0.5606	30
SULAWESI SELATAN	0.7577	0.7444	0.7115	0.7304	0.7413	0.7509	0.7394	10
SULAWESI TENGGARA	0.5821	0.5970	0.6642	0.6315	0.6521	0.6327	0.6266	21
GORONTALO	0.5793	0.5751	0.6153	0.6012	0.6059	0.5911	0.5947	25
SULAWESI BARAT	0.4185	0.4438	0.4437	0.4427	0.4485	0.4447	0.4403	32
MALUKU	0.6206	0.6132	0.6498	0.6842	0.7025	0.6770	0.6579	15
MALUKU UTARA	0.5450	0.5690	0.6093	0.6057	0.6263	0.6021	0.5929	26
PAPUA BARAT	0.7641	0.8133	0.8463	0.8416	0.8277	0.8365	0.8216	6
PAPUA	0.6231	0.6318	0.6465	0.6399	0.6368	0.6344	0.6354	19
RATA-RATA	0.6654	0.6630	0.6794	0.6899	0.6907	0.6889	0.6795	

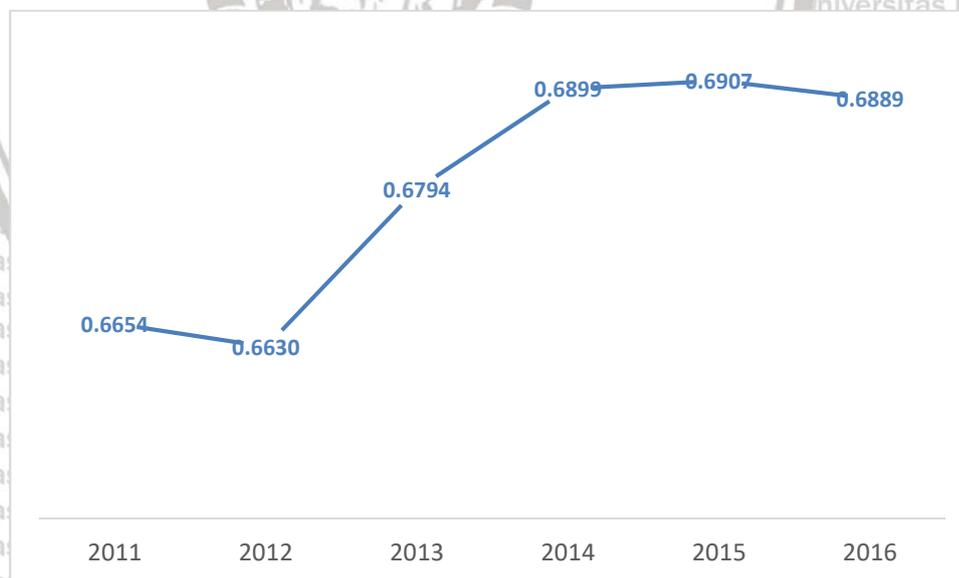
Sumber: Data diolah, 2018

5.3 Pembahasan

Hasil perhitungan rata-rata nilai Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dari 33 propinsi di Indonesia pada periode 2011 – 2016 menunjukkan bahwa terdapat 24 provinsi yang tergolong kategori Keuangan Inklusif Tinggi dan sisanya 9 provinsi tergolong Keuangan Inklusif Sedang, serta tidak terdapat provinsi dengan tingkat

Keuangan Inklusif yang rendah. Sementara itu nilai rata-rata IIK pada 33 provinsi Indonesia sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0,6795 yang mencerminkan bahwa secara umum Indonesia memiliki tingkat Keuangan Inklusif yang tinggi. Selain itu, rata-rata IIK cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana gambar 5.1.

Gambar 5.1 Rata-rata Indeks Inklusi Keuangan 33 Provinsi di Indonesia



Hasil perhitungan tersebut juga sejalan dengan hasil yang didapat pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh OJK, meskipun dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda. Hasil dari survei yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan pada

tahun 2016 adalah sebesar 67,82% (Tinggi) dengan sebagian besar provinsi memiliki nilai IKK yang terkategori tinggi dan hanya dua provinsi yang tergolong sedang.

Nilai IKK yang tinggi pada sebagian besar provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa akses masyarakat di Indonesia terhadap lembaga keuangan formal sudah cukup tinggi. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait untuk meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia cukup berhasil.

Adapun nilai ketiga dimensi dalam IIK rata-rata tergolong tinggi yaitu dimensi Penetrasi Perbankan (Aksesibilitas) sebesar 0,77 (skala 0 – 1), Ketersediaan jasa keuangan (Availibilitas) sebesar 0,66 (skala 0-1), dan Penggunaan jasa perbankan sebesar 0,77 (skala 0-1) dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Dimensi Penetrasi Perbankan (Aksesibilitas)

Nilai pada dimensi ini berasal dari jumlah akun rekening perbankan per 1000 penduduk dewasa dalam tiap provinsi. Pada tahun 2016, rata-rata dari seluruh provinsi jumlah kepemilikan akun rekening perbankan sebanyak 1049,61 akun rekening per 1000 penduduk dewasa. Hal ini mencerminkan bahwa secara rata-rata nasional seluruh penduduk dewasa telah memiliki akun rekening perbankan.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan nilai dimensi Aksesabilitas terendah sebesar 630,46, yang artinya hanya terdapat 630,46 akun rekening bank dalam 1000 penduduk dewasa atau hanya 63,05% penduduk dewasa yang memiliki akun rekening bank. Sedangkan di DKI Jakarta terdapat 3444,74 akun

rekening bank dalam 1000 penduduk dewasa, atau tiga kali lipat dari jumlah penduduk dewasa DKI Jakarta.

Namun demikian, apabila melihat persebaran nilai tiap propinsi akan diketahui bahwa masing-masing provinsi memiliki aksesibilitas yang bervariasi dengan gap yang tinggi sebagaimana gambar 5.2. Selain itu, jumlah akun rekening belum tentu mencerminkan jumlah pemilik akun, karena bisa jadi terdapat seorang individu yang memiliki lebih dari satu akun rekening.

Di Indonesia sendiri saat ini belum terdapat peraturan yang membatasi jumlah kepemilikan akun rekening perbankan atau merangkum seluruh akun yang dimiliki seorang individu menjadi satu.

2. Dimensi ketersediaan jasa keuangan (Avalibilitas)

Ketersediaan jasa dalam penelitian ini diindikasikan dengan jumlah outlet bank berupa jaringan kantor dan ATM per 100.000 penduduk dewasa dalam satu provinsi. Pada tahun 2016, rata-rata dari seluruh provinsi jumlah outlet bank sebanyak 30,81 per 100.000 penduduk dewasa. Sulawesi Barat mendapatkan nilai terendah dengan hanya terdapat 14 outlet bank per 100.000 penduduk dewasa. Sedangkan DKI Jakarta mendapatkan nilai tertinggi dengan 122 outlet bank per 100.000 penduduk dewasa.

Pada era kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini, ketersediaan akses pada Lembaga jasa keuangan tidak hanya terbatas pada outlet fisik bank, namun juga melalui saluran lainnya seperti layanan *phone banking* dan *internet banking*, sehingga mengurangi pentingnya outlet fisik bank.

Selain itu, munculnya konsep *financial technology (fintech)* turut mempengaruhi peran outlet fisik lembaga keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis *fintech*, antara lain *fintech* yang bergerak di bidang alat

pembayaran (*electronic money*) dan *fintech peer to peer lending* dengan model bisnis berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang memudahkan orang untuk mengajukan kredit tanpa harus datang ke outlet fisik bank.

3. Dimensi Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan

Dimensi ini digunakan karena terdapat anggapan bahwa kepemilikan akun rekening bank saja tidak cukup menggambarkan sistem keuangan yang inklusif karena terdapat masyarakat yang hanya memiliki akun rekening namun tidak memanfaatkan layanan perbankan yang ada. Pada penelitian ini digunakan indikator jumlah kredit yang disalurkan ditambah dana pihak ketiga (DPK) terhadap PDRB. Pada tahun 2016, rata-rata dari seluruh provinsi proporsi kredit dan DPK terhadap PDRB sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa perbankan cukup tinggi di masyarakat.

Provinsi Riau mendapat nilai terendah dengan 0,27 proporsi kredit dan DPK terhadap PDRB. Sedangkan DKI Jakarta mendapat nilai tertinggi dengan 2,98 proporsi kredit dan DPK terhadap PDRB, atau hampir tiga kali lipat.

Dari hasil tersebut di atas, DKI Jakarta menempati sebagai peringkat pertama dengan nilai IIK pada periode tahun 2011 – 2016 rata-rata sempurna sebesar 0,9999. Hal ini merupakan nilai yang wajar mengingat provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara sehingga segala aktivitas perekonomian berpusat di sini.

Pada dimensi penetrasi perbankan (Aksesibilitas), terdapat 3444,74 akun rekening bank dalam 1000 penduduk dewasa, atau tiga kali lipat dari jumlah penduduk dewasa DKI Jakarta. Kemudian pada dimensi Ketersediaan jasa keuangan (Aavailibilitas), terdapat 122 outlet bank dalam 100.000 penduduk dewasa, jauh di atas rata-rata di seluruh provinsi sebesar 49,19 outlet per 100.000 penduduk dewasa. Dan pada dimensi Penggunaan jasa perbankan, jumlah nominal kredit dan

dana pihak ketiga bank sebesar 298% dari PDRB, atau hampir tiga kali lipat dari PDRB.

Di sisi lain, provinsi Lampung mendapatkan nilai terendah IIK rata-rata sebesar 0,4338. Pada dimensi penetrasi perbankan (Aksesibilitas), terdapat 630,46 akun rekening bank dalam 1000 penduduk dewasa atau hanya 63,05% penduduk dewasa yang memiliki akun rekening bank. Kemudian pada dimensi Ketersediaan jasa keuangan (Availibilitas), hanya terdapat 16,26 outlet bank dalam 100.000 penduduk dewasa, jauh di bawah rata-rata dari seluruh provinsi sebesar 49,19 outlet per 100.000 penduduk dewasa. Dan pada dimensi Penggunaan jasa perbankan, jumlah nominal kredit dan dana pihak ketiga bank sebesar 37,97% dari PDRB, atau hanya sekitar sepertiga dari PDRB.



BAB VI

HASIL ESTIMASI PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN

6.1 Hasil Estimasi

6.1.1 Pengujian Pemilihan Permodelan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan dan faktor-faktor lainnya terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia periode 2011 – 2016 dengan menggunakan metode regresi data panel. Regresi data panel memiliki tiga jenis model yaitu *Common Effect Model* (CEM) atau *pool*, *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga jenis model regresi data panel tersebut akan ditentukan model penelitian yang paling sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini. Uji pemilihan permodelan dalam penelitian ini menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*, sehingga memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.1 Uji Chow

Effect test	Prob
Cross-section Chi-square	0.0000

Sumber: Data Diolah

Nilai yang digunakan dalam Uji Chow adalah nilai probabilitas *cross section F*.

Hipotesis yang digunakan dalam melakukan Uji Chow adalah sebagai berikut:

H0: penelitian menggunakan *Fixed Effect Models* (FEM)

H1: penelitian menggunakan *Common Effect Models* (CEM)

Apabila nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* dari Uji Chow memiliki tingkat signifikansi dibawah 0,1 maka H0 diterima. Hasil nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* dari ketiga model penelitian ini dibawah 0,1, sehingga H0 penelitian diterima

dan H1 ditolak. Dengan demikian, model data panel yang tepat dalam penelitian ini menurut Uji Chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Selanjutnya, setelah Uji Chow dilakukan Uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih manakah model data panel yang paling tepat antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.2 Uji Hausman

Effect test	Prob
Cross-section random	0.0000

Sumber: Data diolah

Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah:

H0: Penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

H1: Penelitian menggunakan *Random Effect Model* (REM)

apabila nilai probabilitas yang dihasilkan dari *cross section random* Uji Hausman kurang dari 0,1 maka H0 penelitian diterima dan H1 penelitian ditolak. Nilai probabilitas *cross section random* Uji Hausman ini adalah 0.0000 atau kurang dari 0,1, sehingga model data panel yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini menurut Uji Housman adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Menurut Gujarati (2012) *Fixed Effect* merupakan model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subyek penelitian (data *cross-section*), namun *slope* untuk setiap subyek tersebut tidak berubah seiring waktu.

6.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya adalah *Best Linear Unbiased Estimator* (Ghozali, 2012).

1. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan metode VIF (*Variance Inflating Factor*), pada tabel 6.3 di bawah ini disajikan masing-masing nilai VIF variabel-variabel independen sebagai berikut:

Tabel 6.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel independen	VIF	Keterangan
IJK	1.299257	Non Multikolinieritas
PDRB	1.112822	Non Multikolinieritas
INFLASI	1.073825	Non Multikolinieritas
SCHOOL	1.513687	Non Multikolinieritas
GPOP	1.278534	Non Multikolinieritas
TRADE	1.187225	Non Multikolinieritas

Adapun asumsi yang harus dipenuhi uji VIF adalah nilai VIF masing-masing variabel independen harus kurang dari 10 yang menandakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas di dalam model. Nilai ini adalah batasan yang menunjukkan hubungan multikolinieritas yang semakin kuat jika nilai VIF makin besar dari 10 (Gujarati 2003). Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing nilai VIF variabel kurang dari 10, sehingga tidak ada hubungan yang kuat di antara variabel independen sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas di dalam model regresi yang digunakan.

2. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan nilai Durbin-Watson Stat, hasil proses uji ini ditampilkan pada tabel 6.4 di bawah ini:

Tabel 6.4 Nilai Durbin Watson

Durbin-Watson hitung	Durbin Watson Tabel	Interprestasi
1.462402	1.7158	Terjadi autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antara suatu periode tertentu (t) dengan periode yang terjadi sebelumnya ($t-1$). Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 6.4 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hitung lebih kecil dari Durbin Watson Tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model.

3. Uji Normalitas

Dengan menggunakan metode uji *Jarque-Berra (JB Test)*, perincian hasil uji disajikan pada tabel 6.5 di bawah ini:

Tabel 6.5 Hasil JB Test

Nilai Prob JB Test	Keterangan
0.0000	Tidak Berdistribusi Normal

Adapun asumsi yang harus dipenuhi uji *Jarque-Berra* adalah apabila probabilitas *JB Test* lebih besar dari 0.05 maka residual regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 6.5 diketahui bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk pada kedua model lebih kecil dari taraf nyata 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terhadap residual regresi tidak terpenuhi.

6.1.3 Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Penelitian ini menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan formulasi persamaan sebagai berikut:

$$hcount_{it} = \alpha + \beta_2 IIK_{it} + \beta_3 pdrb_{it} + \beta_4 inflasi_{it} + \beta_5 school_{it} + \beta_6 g_pop_{it} + \beta_7 trade_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari hasil perhitungan regresi panel data kedua model di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.6 Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Dependent Variable: HCOUNT
Method: Panel Least Squares
Date: 02/06/19 Time: 11:01
Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.33858	1.928227	12.10365	0.0000
IIK	-0.066323	0.027687	-2.395416	0.0178
PDRB	-0.060291	0.028458	-2.118643	0.0357
INFLASI	-0.019134	0.023183	-0.825353	0.4104
SCHOOL	-0.097703	0.015735	-6.209344	0.0000
GPOP	0.323205	0.236271	1.367944	0.1733
TRADE	0.002687	0.007668	0.350429	0.7265

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989266	Mean dependent var	12.12384
Adjusted R-squared	0.986701	S.D. dependent var	6.381481
S.E. of regression	0.735928	Akaike info criterion	2.399207
Sum squared resid	86.11275	Schwarz criterion	3.046896
Log likelihood	-198.5215	Hannan-Quinn criter	2.661370
F-statistic	385.6279	Durbin-Watson stat	1.462402
Prob(F-statistic)	0.000000		

6.1.3.1. Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen terhadap variabel independen dapat diketahui dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) sendiri memiliki hasil nilai nol sampai dengan satu. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tertera dalam Tabel 6.6, koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai 0.989266 dan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2) 0.986701. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini (IIK ; $pdrb$; $inflasi$; $school$; g_pop ; $trade$) dapat menjelaskan variabel dependen ($headcount\ ratio$) sebesar 98,67%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam model pengujian penelitian ini.

6.1.3.2. Uji F

Uji F ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (signifikansi) dari hasil yang diperoleh. Dari hasil estimasi di atas didapatkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.00000 yang berarti lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0.05). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen penelitian secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

6.1.3.3. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dalam pengujian terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai

probabilitas (signifikansi) dari masing-masing variabel terhadap $\alpha=5\%$ (0.05). Dalam pengujian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Inklusi Keuangan (*IIK*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.0178 < \alpha = 0.05$ dengan koefisien -0.066323. Dengan demikian variabel *IIK* menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap variabel dependen jumlah penduduk miskin (*hcount*).
2. Variabel Pertumbuhan GDP perkapita (*pdrb*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.0357 < \alpha = 0.05$ dengan koefisien -0.060291. Dengan demikian variabel *pdrb* menunjukkan hubungan pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap variabel dependen jumlah penduduk miskin (*hcount*).
3. Variabel Inflasi (*INFLASI*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.4104 > \alpha = 0.05$ dengan koefisien -0.019134. Dengan demikian variabel *INFLASI* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *hcount*.
4. Variabel Angka Partisipasi Sekolah Murni (*SCHOOL*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$ dengan koefisien -0.097703. Dengan demikian variabel *SCHOOL* menunjukkan hubungan pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen jumlah penduduk miskin (*hcount*).
5. Variabel Pertumbuhan Populasi (*g_pop*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.1733 > \alpha = 0.05$ dengan koefisien 0.323205. Dengan demikian variabel *g_pop* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *hcount*.
6. Variabel Keterbukaan Perdagangan (*trade*) memiliki nilai probabilitas statistik sebesar $0.7265 > \alpha = 0.05$ dengan koefisien 0.002687. Dengan demikian variabel *trade* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *hcount*.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Headcount index menghitung persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat Inklusi Keuangan pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hal ini menunjukkan sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain penelitian oleh Beck dkk (2004), Shahbaz dan Islam (2011), dan Ang (2010), namun sejalan dengan penelitian oleh Seven dan Coskun (2016), Claessens dan Perotti (2007), Law dan Tan (2009).

Pembangunan sektor keuangan (dalam hal ini peningkatan inklusi keuangan) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui dua cara, yaitu secara tidak langsung (yaitu melalui pertumbuhan ekonomi) dan secara langsung.

Yang pertama, secara tidak langsung. Terciptanya sektor keuangan yang handal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terjadinya peningkatan jumlah simpanan, akumulasi modal, inovasi teknologi, dan peningkatan pendapatan (Zhuang dkk., 2009). Pertumbuhan ekonomi tersebut secara tidak langsung kemudian akan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

Terdapat beberapa saluran bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan (Zhuang dkk., 2009) yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan munculnya lapangan kerja baru dan kesempatan yang lebih banyak bagi kelompok miskin.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar buruh yang terampil (*skilled*) dengan yang tidak

terampil (*unskilled*). Hal ini menguntungkan bagi kelompok miskin yang umumnya *unskilled labor*.

3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan meningkatkan pendapatan pajak yang semakin tinggi pula. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengeluaran sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga akan bermanfaat bagi orang miskin. Selain itu, kelompok miskin juga akan dapat berinvestasi lebih banyak dalam modal manusia (*human capital*).

4. Dengan peningkatan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan lebih banyak dana yang didapatkan orang miskin untuk dialokasikan pada tujuan investasi, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

Yang kedua pengaruh secara langsung. Selama ini, masyarakat miskin memiliki hambatan untuk mendapatkan akses terhadap jasa lembaga keuangan formal. Hal ini karena asimetri informasi menghasilkan hambatan kredit yang secara khusus menghalangi orang miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mendanai usaha mereka sendiri, atau jaminan untuk mendapatkan kredit bank (Zhuang dkk., 2009).

Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan meningkatkan inklusi keuangan. Meningkatnya inklusi keuangan akan mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi sehingga memudahkan akses jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Dengan mendapatkan permodalan, kelompok miskin dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya (Greenwood dan Jovanovic 1990). Selain itu, pembangunan sektor keuangan juga akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (*human capital*) melalui peningkatan pendidikan dan mengurangi

kerentanan kemiskinan dengan adanya dana darurat serta perataan konsumsi (*consumption smoothing*).

6.2.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dari enam variabel independen yang diteliti, terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jumlah penduduk miskin, yaitu variabel Indeks Inklusi Keuangan yang berpengaruh negatif, variabel PDRB (yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi) yang berpengaruh negatif, dan tingkat partisipasi sekolah yang berpengaruh negatif.

Sedangkan ketiga variabel lainnya (Inflasi, Pertumbuhan Populasi, dan Keterbukaan Perdagangan) tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang digambarkan oleh variabel tingkat partisipasi sekolah murni menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Peningkatan angka partisipasi sekolah murni sebesar 1 persen akan menurunkan persentase dari jumlah penduduk miskin sebesar 0,977 persen. Sementara itu, rata-rata tingkat partisipasi murni sampai dengan usia SMP di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 77,95%, artinya masih terdapat sekitar seperempat penduduk Indonesia yang tidak memiliki pendidikan sampai dengan usia SMP.

Menurut Chriswardani (2005), terdapat keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi karena pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan menjadi sarana penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pengembangan strategi

produk, inovasi teknologi, dan penelitian-penelitian untuk mengatasi masalah kemiskinan.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Karena keterbatasan kesediaan data, dalam penelitian ini data yang diteliti hanya tahun 2011 – 2016. Apabila terdapat data yang lebih lengkap, penelitian dapat dilakukan dengan data periode yang lebih panjang.
2. Dalam penelitian ini, pengukuran inklusi keuangan hanya menggunakan data perbankan, sementara inklusi keuangan sendiri pada dasarnya meliputi seluruh Lembaga jasa keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, dan sebagainya.
3. Perhitungan tiap dimensi dalam Indeks Inklusi Keuangan belum dapat sepenuhnya mencakup kondisi yang sebenarnya karena tidak tersedianya data. Antara lain perhitungan dimensi aksesibilitas menggunakan jumlah akun rekening dalam tiap provinsi dapat berpotensi menimbulkan bias karena setiap individu dapat memiliki jumlah rekening lebih dari 1 akun. Kemudian untuk dimensi penggunaan jasa perbankan hanya menggunakan data kredit dan tabungan, sementara layanan perbankan lain, seperti pembayaran, transfer dan pengiriman uang sulit dihitung karena tidak tersedianya data yang memadai.
4. Model penelitian ini mengacu pada penelitian Beck, dkk (2007) terbatas dengan variabel-variabel di dalamnya, sehingga masih memungkinkan pengukuran menggunakan model dengan memasukkan variabel-variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

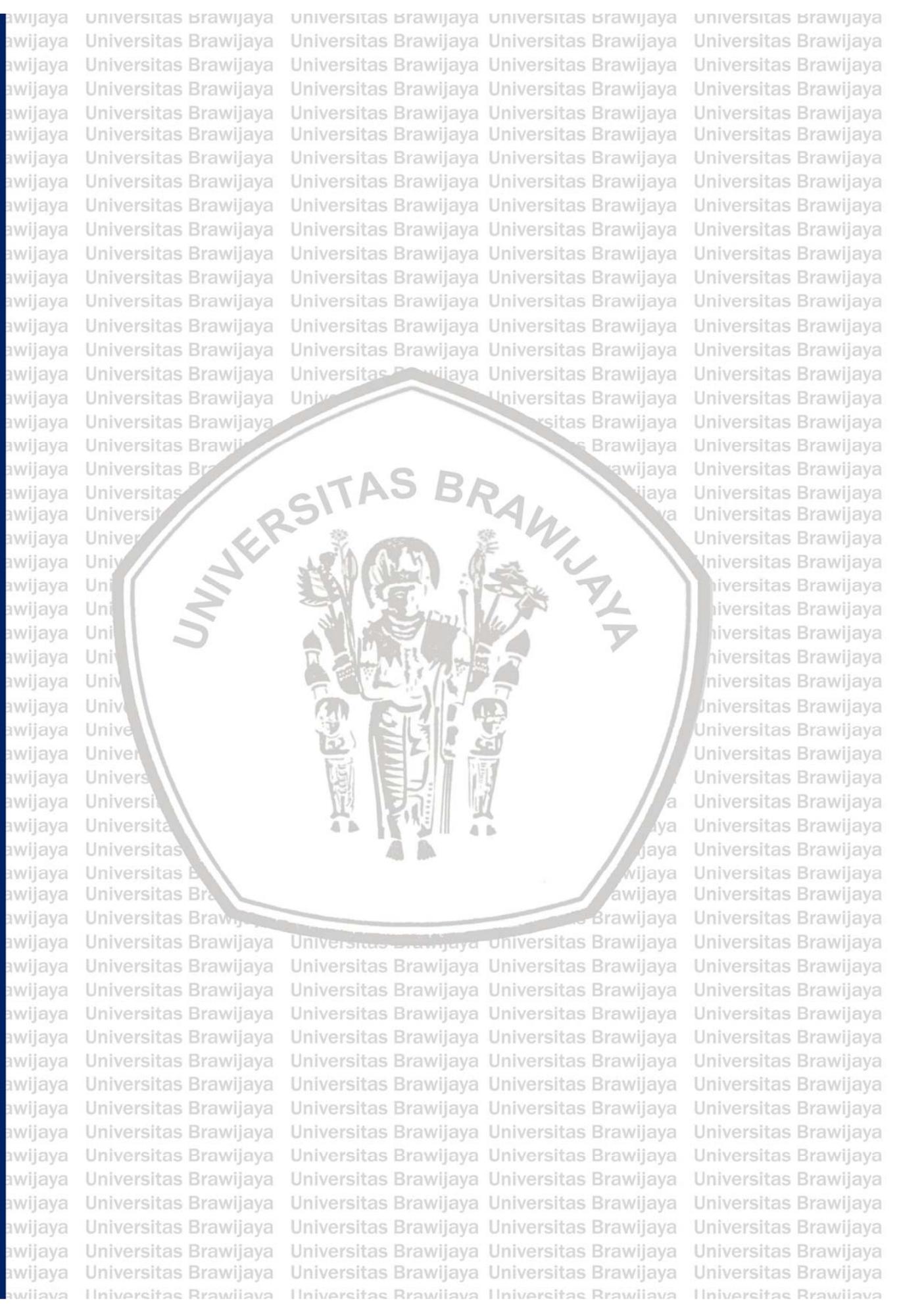
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2011 - 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari nilai Indeks Inklusi Keuangan (IIK) 33 provinsi di Indonesia pada periode 2011 – 2016, terdapat 24 provinsi yang tergolong kategori Keuangan Inklusif Tinggi dan sisanya 9 provinsi tergolong Keuangan Inklusif Sedang, serta tidak terdapat provinsi dengan tingkat Keuangan Inklusif yang rendah. Sementara itu nilai rata-rata IIK pada 33 provinsi Indonesia sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0,6795 yang mencerminkan bahwa secara umum Indonesia telah memiliki tingkat Keuangan Inklusif yang tinggi.
2. Tingkat Inklusi Keuangan pada 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Selain Indeks Inklusi Keuangan yang berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, PDRB (yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi) dan tingkat partisipasi sekolah juga berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sedangkan Inflasi, Pertumbuhan Populasi, dan Keterbukaan Perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan tingkat inklusi keuangan terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat program-program yang mendukung peningkatan inklusi keuangan. Provinsi dengan tingkat aksesibilitas yang tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya seperti Lampung, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur, perlu ditingkatkan jumlah pengguna jasa lembaga keuangan seperti perbankan. Provinsi dengan tingkat ketersediaan jasa keuangan rendah seperti Sulawesi Barat, Lampung, dan NTT perlu ditingkatkan jumlah outlet banknya atau dengan memperluas akses perbankan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Provinsi dengan tingkat penggunaan rendah seperti Riau, Sulawesi Barat, dan Lampung perlu ditingkatkan penggunaan jasa keuangan untuk mengimbangi PDRB daerah tersebut.
2. Perkembangan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan. Misalnya dengan mengembangkan *financial technology* dan pengembangan produk serta layanan jasa keuangan lainnya.
3. Meskipun Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia tergolong tinggi, namun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2016, Indeks literasi keuangan hanya sebesar 29,66%. Yang artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia hanya terdapat 21 orang yang *well literate*. Sehingga penduduk di Indonesia perlu meningkatkan literasi keuangan sehingga dapat mengoptimalkan manfaat dari layanan jasa keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Agussalim. 2005. "Sanggupkah Pertumbuhan Ekonomi Memperbaiki Ketimpangan dan Mereduksi Kemiskinan", *Makalah Terpilih pada Calls for Papers Simposium Riset Ekonomi II: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan*. ISEI Surabaya. Surabaya, 23-24 November 2005

Ajija, Shochrul Rohmatul, Dyah Wulan Sari, Rahmat Setianto, and Martha Rangi Primanthy. 2010. *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*. 1st editio. Jakarta: PT Salemba Empat.

Bank Indonesia. "Keuangan Inklusif Di Indonesia."
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx> (March 25, 2018).

Beck, Thorsten, Asli Demirguc-Kunt, and Ross Levine. 2007. "Finance, Inequality and the Poor." *Journal of Economic Growth* 12(1): 27–49.

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Ross Levine. 2005. "Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence." *NBER Working Papers* (Working Paper 15275).

Becker, Gary S. 1995. *Human Capital and Poverty Alleviation*.

BPS. 2017. "Badan Pusat Statistik."
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/1378/profil-kemiskinan-di-indonesia-september-2016.html> (February 22, 2018).

Brune Xavier Goldberg, Jessica Yang, Dean, Lasse Giné. 2011. Policy Research Working Papers *Commitments to Save: A Field Experiment in Rural Malawi*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5748>.

Burgess, Robin, and Rohini Pande. 2005. "Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment." *American Economic Review* 95(3): 780–95.

Chriswardani, Suryawati. 2005. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 08(03).

Cihak, Martin, A Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, and Ross Levine. 2012. World Bank Policy Research Working Papers WPS6175 *Benchmarking Financial Systems around the World*.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/08/16669897/benchmarking-financial-systems-around-world>.

Claessens, Stijn, and Enrico Perotti. 2007. "Finance and Inequality: Channels and Evidence." *Journal of Comparative Economics* 35(4): 748–73.
<https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jcecon:v:35:y:2007:i:4:p:748-773>.

Dollar, David, and Aart Kraay. 2002. "Growth Is Good for the Poor." *Journal of*

Economic Growth 7(3): 195–225.

Easterly, William, and Stanley Fischer. 2001. "Inflation and the Poor." *Journal of Money, Credit and Banking* 33(2): 160.

<http://www.jstor.org/stable/2673879?origin=crossref>.

Greenwood, Jeremy, and Boyan Jovanovic. 1990. "Financial Development, Growth, and the Distribution of Income." *Journal of Political Economy* 98(5): 1076–1107.

Guillaumont Jeanneney, Sylviane, and Kangni Kpodar. 2008. "Financial Development and Poverty Reduction: Can There Be a Benefit without a Cost?" *IMF Working Papers* 08(62): 1. <http://elibrary.imf.org/view/IMF001/09071-9781451869248/09071-9781451869248/09071-9781451869248.xml>.

Haughton, Jonathan, and Shahidur R. Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The World Bank.

Jalilian, Hossein, and Colin Kirkpatrick. 2002. "Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries." *International Journal of Finance & Economics* 7: 97–108.

Jauch, Sebastian, and Sebastian Watzka. 2016. "Financial Development and Income Inequality: A Panel Data Approach." *Empirical Economics* 51(1): 291–314. https://econpapers.repec.org/RePEc:spr:empeco:v:51:y:2016:i:1:d:10.1007_s00181-015-1008-x.

Law, Siong Hook, and Hui-Boon Tan. 2009. "The Role Of Financial Development On Income Inequality In Malaysia." *Journal of Economic Development* 34(2): 153–68. <https://econpapers.repec.org/RePEc:jed:journl:v:34:y:2009:i:2:p:153-168>.

Levine, Ross. 2004. *Finance And Growth: Theory And Evidence*. Cambridge.

Park, Cyn-Young, and Rogelio V. Mercado. 2015. "Financial Inclusion , Poverty and Income Inequality In Developing Asia." *ADB Economics Working Paper Series* (426): 17.

Saad-Filho, Alfredo. 2010. "Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth." *UN/DESA Working Papers* 60(100): 1–16.

Sarma, Mandira. 2008. "Index of Financial Inclusion." *Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper No 215* (215): 1–26.

———. 2012. "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness." *Berlin Working Papers on Money, Finance and Trade Development* (07): 1–34.

———. 2015. "Measuring Financial Inclusion." *Economics Bulletin* 35(1): 604–11.

Seven, Unal, and Yener Coskun. 2016. "Does Financial Development Reduce Income Inequality and Poverty? Evidence from Emerging Countries." *Emerging Markets Review* 26: 34–63. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ememar.2016.02.002>.

Shahbaz, Muhammad, and Faridul Islam. 2011. "Financial Development And Income Inequality In Pakistan: An Application Of Ardl Approach." *Journal Of Economic*

Development 36(1).

The World Bank. 2014. *Financial Inclusion*.

<http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>.

Todaro, M P, and S C Smith. 2012. *Economic Development*. Addison-Wesley.

Zhuang, Juzhong et al. 2009. *Financial Sector Development , Economic Growth , and Poverty Reduction : A Literature Review Financial Sector Development , Economic Growth , and Poverty Reduction : A Literature Review*. Metro Manila.

Zuhra, Wan Ulfa Nur. 2017. "Bumerang Inklusi Keuangan." *Tirto.id*.

<https://tirto.id/bumerang-inklusi-keuangan-ck1g> (July 21, 2018).

